ISSN 2962-4177

Lensa Pembangunan

BULETIN

EDISI 3 JULI - SEPTEMBER 2025

Era Kepemimpinan Baru: Arah dan Strategi Pembangunan Kalimantan Utara 2025-2029



ISSN 2962-4177



OFFICIAL SOCIAL MEDIA

BAPPEDA DAN LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

bappedalitbang_kaltara

bappedadanlitbangprov_kalimantanutara

bappeda&litbangprovkaltara

bappedalitbang_kaltaraprov.go.id

TAJUK



Seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Lensa Pembangunan ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi ketiga tahun 2025, Buletin Lensa Pembangunan akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini Lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Era Kepemimpinan Baru: Arah dan Strategi Pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029. Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, merupakan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Sangat penting untuk memahami arah dan strategi pembangunan Kaltara kedepan.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti dialog dengan Bupati dan Walikota di Kalimantan Utara, Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI, dan Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi derah serta rubrik lingkungan yang akan membuka wawasan baru bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca.



Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH
Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI
Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

EDITOR
Linda Marlisa

PENULIS ARTIKEL
Tim Penulis

DESAIN GRAFIS
Cristove Dismond, Ady Setiawan

SEKRETARIAT
Muhammad Roja Fajari, Jeri Markelius
Dewi Erisna Utami

ALAMAT REDAKSI
Jl. Agathis, Gedung PUPR-PERKIM Lt. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara

BULETIN LENSA PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA

ERA KEPEMIMPINAN BARU: ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029 7

DIALOG TOKOH

SYARWANI, S.PD., M.SI - BUPATI BULUNGAN

SEMANGAT TENGUYUN : KUNCI MEMBANGUN BULUNGAN DI TENGAH KEBERAGAMAN 14

dr. H. KHAIRUL, M.KES - WALIKOTA TARAKAN

KONSOLIDASI FISKAL, DIGITALISASI PENDIDIKAN, DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN 21

H. IRWAN SABRI, S.E - BUPATI NUNUKAN

NUNUKAN DI GARIS DEPAN : MEMBANGUN DARI PERBATASAN MENUJU KEMAKMURAN 33

IBRAHIM ALI, S.P - BUPATI TANA TIDUNG

MEMBANGUN TANA TIDUNG DARI HATI : VISI BERKELANJUTAN UNTUK DAERAH TERMUDA DI KALTARA 40

LIPUTAN KEGIATAN

KONFERENSI NASIONAL PENDANAAN EKOLOGIS VI 2025 56

DARI SMA GARUDA UNTUK GENERASI UNGGUL DAN KALIMANTAN UTARA MAJU 60

MATANGKAN RPJMD 2025 – 2029 LEWAT EVALUASI RANPERDA 64

VERIFIKASI RENSTRA PD 2025–2029, UNTUK PERENCANAAN LEBIH TERPADU 65

EVALUASI DAERAH JADI KUNCI LOMPATAN PELAYANAN PUBLIK KALIMANTAN UTARA 66

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025 68

SINERGI TIM PPED UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 70

INOVASI DAERAH

GASMITEK : GAS DETEKTOR DAN SPRINKLER AIR BERBASIS *INTERNET OF THING* 75

ALAT SEMPROT DORONG OTOMATIS TANPA MEMOMPA DAN ANTI GENDONG (SI SEMPRONG) 77

DETEKSI FATIGUE DRIVER (DFD TOOLS) 79

LINGKUNGAN

POLA PEMANFAATAN LOKAL PADA EKOSISTEM GAMBUT 88

DELEGASI SRI LANKA PELAJARI REHABILITASI MANGROVE DI KALIMANTAN UTARA 90

QUICK POLICY

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 92

MUATAN LOKAL

MENGENAL TOKOH *URBAN LEGEND* DARI KALTARA (BAGIAN 2) 98

"Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas keharmonisan, dan keakraban sehingga kita bisa bersama-sama membangun Kaltara yang kita cintai bersama"

Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum



ERA KEPEMIMPINAN BARU: ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029

Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, merupakan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 di era kepemimpinan Bapak Gubernur Zainal A. Paliwang dan Bapak Wakil Gubernur Ingkong Ala. Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah dimana RPJMD periode 2025-2029 ini merupakan tahap pertama pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025-2045. Perwujudan visi RPJMD dicapai melalui pelaksanaan 8 misi pembangunan yaitu:



- Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan;
- Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
- Mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif;
- Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI;
- Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- Memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan;
- Memantapkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah LIngkungan;
- Mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan Visi Kalimantan Utara 2025-2029 membutuhkan agenda pembangunan yang dirumuskan berbasis misi dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi sebagai pentahapan pembangunan dirumuskan dalam bentuk tema pembangunan tahunan yang selanjutnya dapat menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tediri dari :

Tahap 1 tahun 2026, dengan tema Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis optimalisasi potensi daerah.



Gubernur Zainal A. Paliwang bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Desa Long Nawang

Tahap 2 tahun 2027 yaitu Pembangunan wilayah yang merata, SDM berkarakter dan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang Makmur.

Tahap 3 tahun 2028 dengan tema Pembangunan SDM unggul dan sentra ekonomi hijau menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berkelanjutan.

Tahap 4 tahun 2029 dengan tema Kemajuan Pembangunan segala bidang menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berdaya saing.

Dan pada akhir periodesasi RPJMD yaitu pada Tahap 5 tahun 2030 dengan tema Perwujudan fondasi transformasi yang kokoh untuk Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

Strategi juga terkait arah pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Arah pembangunan wilayah memiliki peran penting untuk memandu arah pembangunan kabupaten/kota agar terpadu dan kolaboratif dengan pembangunan provinsi.

Strategi pembangunan Kabupaten Bulungan diantaranya Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian, Pengembangan pelabuhan logistik, Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan, Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, Pengembangan kawasan industri hijau.

Kemudian Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan tambak, Penataan kawasan permukiman yang layak huni, Peningkatan konektivitas wilayah, Pengembangan kawasan *green economy* dan Pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk Kabupaten Nunukan, dirumuskan strategi Pembangunan diantaranya Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan, Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan, Dukungan optimalisasi PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di Kawasan sekitarnya, Fasilitasi pengembangan ruang pertanahan dan keamanan, Penguatan dan konsistensi Kerjasama pengelolaan Kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Kemudian, Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisatan dan budaya, Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional dan Pengembangan kawasan sentra rumput laut dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan PKSN Nunukan.

Strategi pembangunan Kabupaten Tana Tidung diantaranya Akselerasi kualitas pelayanan dasar, Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan tambak, Pengembangan pelabuhan logistik, Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai, Pengembangan kawasan kampung nelayan, dan Penataan permukiman yang layak huni.

Strategi pembangunan Kota Tarakan diantaranya Akselerasi kualitas pelayanan dasar, Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian, Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan, Pengembangan kawasan industri hijau, Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove, Pengembangan kawasan kampung nelayan, Penataan permukiman layak huni, Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan dan Optimalisasi pemanfaatan poros Maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan Internasional.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau diantaranya Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan, Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman, Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan, Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar, Optimalisasi Kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi, Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya dan Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.

Strategi Pembangunan kewilayahan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara perlu selaras dengan arah Pembangunan kewilayahan yang terdapat di dalam RPJMN tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan
   - Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan
   - Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan
2. Kawasan Komoditas Unggulan
   - Kawasan Sentra Rumput Laut di Kabupaten Nunukan
3. Kawasan Afirmasi
   - Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
   - Kawasan Transmigrasi (KT) Salim Batu di Kabupaten Bulungan
4. Kawasan Konservasi
   - Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau

Strategi sebagai pentahapan pembangunan dan lokus pembangunan kewilayahan, diperkuat dengan arah kebijakan pada setiap misi RPJMD.

Pada misi pertama **Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit menular (TBC, HIV/Aids, Malaria), Pemenuhan tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan spesialis) terutama di daerah 3T, Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Percepatan penurunan stunting, Pemenuhan kualitas dan kompetensi pendidik, Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan Pengembangan



Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)

perlindungan sosial adaptif bagiseluruh masyarakat terutama kelompok rentan.

Pada misi kedua **Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sektor ekonomi unggulan dan potensial secara berkelanjutan, Peningkatan kapasitas pemasaran produk UMKM dan IKM, Hilirisasi komoditas unggulan.



Selain itu, Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk, Pengembangan kawasan industri hijau, pengembangan *blue economy,* peningkatan iklim investasi, peningkatan diversifikasi pangan dan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pada misi ketiga **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, penguatan layanan publik yang mudah dijangkau dan berbasis TIK, peningkatan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah serta peningkatan profesionalitas dan integritas ASN berbasis sistem merit.

Pada misi keempat **Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas, Penyelesaiaan permasalahan *Outstanding Boundary Problems (OBP)* di kawasan perbatasan serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan ketangguhan diplomasi lintas batas yang kolaboratif, peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan pengendalian inflasi daerah.

Pada misi kelima **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang, Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami, mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa, konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan dan Penataan aset reforma agraria melalui penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dan Kawasan dalam hutan.

Pada misi keenam **Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Peningkatan konektivitas wilayah terutama pada daerah 3 TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan), Pengembangan transportasi antarmoda dan multi moda untuk mendukung pengembangan ekonomi superhub IKN, Memperkuat kerjasama antar daerah dalam peningkatan rantai pasok domestik, regional dan global, Fasilitasi penuntasan jalan Trans Kalimantan.

Kemudian Penuntasan rencana umum dan rencana rinci tata ruang termasuk kewenangan tata ruang laut, Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi, pengembangan transportasi perkotaan yang andal, sesuai dan modern dan Pembangunan infrastruktur yang ramah kaum rentan terutama kelompok disabilitas.

Pada misi ketujuh **Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan** dirumuskan arah kebijakan diantaranya Swasembada energi serta penguatan konektivitas



dan transisi energi Listrik, Pengembangan energi terbarukan, Penanganan permukiman kumuh secara komprehensif dan inklusif, Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif, serta Pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat

Pada misi kedelapan **Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas** dirumuskan arah kebijakan Memperkuat sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pembangunan antar pusat dan daerah, Memperkuat penerapan manajemen resiko Pembangunan daerah dan Optimalisasi potensi pembiayaan alternatif.

Dengan komitmen kuat pada delapan misi strategis dan arah kebijakan yang komprehensif, serta dengan sinergi pembangunan kewilayahan, penguatan tata kelola, serta penajaman prioritas berbasis potensi lokal dan tantangan global, Kalimantan Utara melangkah pasti sebagai Beranda Depan NKRI yang maju, makmur, dan tangguh menjadi bagian integral dari Indonesia Emas 2045. (ENR)

"Ilmu akan mengangkat derajat kita, tapi Ahklak yang baik akan menjaga kita dalam Kehidupan"

Ingkong Ala, S.E., M.Si



"TERWUJUDNYA FONDASI TRANSFORMASI KALIMANTAN UTARA YANG **KOKOH SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG MAJU, MAKMUR DAN BERKELANJUTAN"**



Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum
Gubernur Kalimantan Utara

Ingkong Ala, S.E., M.Si.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

MISI RPJMD KALIMANTAN UTARA

MISI 1
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

MISI 2
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN

MISI 3
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG KOLABORATIF DAN INOVATIF

MISI 4
MEMANTAPKAN SUPREMASI HUKUM DAN STABILITAS DAERAH SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI

MISI 5
MEMANTAPKANKETAHANANSOSIALBUDAYADAN EKOLOGI

MISI 6
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN

MISI 7
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN

MISI 8
MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN UTARA UNTUK MENGAWAL INDONESIA EMAS

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD** PROVINSI **KALIMANTAN UTARA**

TAHAP 1 (2026)
Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis optimalisasi potensi daerah

TAHAP 2 (2027)
Pembangunan wilayah yang merata, SDM berkarakter dan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur

TAHAP 3 (2028)
Pembangunan SDM unggul dan sentra ekonomi hijau menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berkelanjutan

TAHAP 4 (2029)
Kemajuan pembangunan segala bidang menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berdaya saing

TAHAP 5 (2030)
Perwujudan fondasi transformasi yang kokoh untuk Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan



SEMANGAT TENGUYUN : KUNCI MEMBANGUN BULUNGAN DI TENGAH KEBERAGAMAN

Dalam dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak di Kabupaten Bulungan, sosok pemimpin daerah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan strategis dan respons terhadap realitas lapangan.
Syarwani, S.Pd., M.Si., Bupati Bulungan periode 2021–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030, adalah salah satu figur yang mengemban mandat tersebut. Melalui wawancara eksklusif ini, kami menggali refleksi, strategi, dan visinya dalam memimpin Bulungan dari masa-masa paling sulit di awal pandemi hingga upaya menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan Kalimantan Utara dan penyangga potensial bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wawancara ini tidak hanya mengungkap kebijakan publik, tetapi juga menampilkan sisi humanis seorang pemimpin yang meyakini bahwa kedekatan dengan rakyat adalah fondasi utama pemerintahan yang responsif dan inklusif.

Redaksi : Dalam periode pertama kepemimpinan bapak, apa kira-kira momen yang paling berkesan yang Bapak alami?

Pada periode pertama, saya dilantik pada tanggal 16 Februari 2021. Saat itu, bukan hanya Indonesia atau Kabupaten Bulungan, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Fokus utama kami saat itu adalah penanganan dan penyelamatan warga masyarakat Bulungan dari dampak penyebaran maupun korban pandemi tersebut.

Ruang gerak kami sangat terbatas, dan kami dihadapkan pada pilihan yang sulit, di satu sisi harus menyelamatkan kesehatan masyarakat Bulungan, namun di sisi lain kegiatan perekonomianterutama bagi masyarakat dan para pelaku usaha UMKM tetap harus berjalan meski dalam kondisi yang serba terbatas.

Alhamdulillah, semua itu berhasil kita lalui. Keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kerja pemerintah, melainkan buah dari kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menangani dan menurunkan angka penyebaran COVID-19.

Dampak positif dari masa sulit itu masih kita rasakan hingga hari ini. Pandemi memberi kita pembelajaran berharga. Misalnya, di bidang pendidikan pada masa itu, interaksi tatap muka antara guru dan siswa beralih menggunakan media daring, sehingga proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Kini, meskipun situasi sudah kembali normal dan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan, kita tetap memiliki opsi pembelajaran daring yang dapat diterapkan kapan saja bahkan tanpa adanya pandemi sebagai bentuk adaptasi dan antisipasi terhadap situasi tertentu.

Yang kedua, pada tanggal 21 Desember 2021,

Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo melakukan *groundbreaking* pembangunan Kawasan Industri di Tanjung Palas Timur. Ini merupakan peluang luar biasa bagi kita semua. Harapan kami, investasi strategis ini terus berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi Provinsi Kalimantan Utara secara umum, tetapi khususnya bagi Kabupaten Bulungan.

Redaksi : Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama memimpin dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?

Kita kembali mengingat pengalaman di tahun 2021 lalu, saat situasi pandemi sedang sangat sulit. Pilihan yang dihadapi saat itu memang tidak mudah. Namun, memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan menjadi prioritas utama kami.

Kami terus mensosialisasikan dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Upaya ini dilakukan hingga ke tingkat paling bawah mulai dari desa, kecamatan, hingga skala kabupaten.

Di sisi lain, kami juga berupaya memastikan agar masyarakat, khususnya para pelaku usaha UMKM, tetap memiliki ruang untuk beraktivitas demi menjaga pendapatan mereka. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan komitmen kuat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan upaya menekan laju penyebaran virus.

Selain itu, kami mendorong pemerintahan di tingkat desa untuk memanfaatkan dana desa dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang membutuhkan. Koordinasi dan komunikasi intensif pun kami lakukan dengan seluruh kepala desa di 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan.

Saya sangat menyadari bahwa di awal tahun 2021, hal yang paling prioritas untuk dilakukan adalah konsolidasi internal, mulai dari seluruh perangkat daerah hingga jajaran pemerintahan desa. Tujuannya agar program-program pembangunan yang kami gagas untuk Kabupaten Bulungan dapat tersosialisasikan dengan baik, serta selaras dan sejalan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat desa.



> Komitmen kami terhadap program-program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 tidak mungkin berhenti hanya pada satu periode kepemimpinan. Program-program tersebut harus berkelanjutan.
>
> Oleh karena itu, dalam periode pemerintahan yang kedua ini, kami akan melanjutkannya melalui visi Kabupaten Bulungan yang berdaulat, maju, dan unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan.
>
> **Syarwani, S.Pd., M.Si.**
> Bupati Bulungan

Redaksi : Menurut Bapak apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan pada saat ini?

Komitmen kami terhadap program-program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 tidak mungkin berhenti hanya pada satu periode kepemimpinan. Program-program tersebut harus berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam periode pemerintahan yang kedua ini, kami akan melanjutkannya melalui visi Kabupaten Bulungan yang berdaulat, maju, dan unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut telah kami tuangkan secara utuh dalam dokumen RPJMD 2025–2029, yang kembali mengadopsi sejumlah program prioritas dari periode 2021–2024. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa program-program tersebut memang memiliki sifat berkelanjutan dan relevan untuk dilanjutkan. Kami juga terus mendorong pemanfaatan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Bulungan, tidak hanya pada skala kecamatan, tetapi hingga ke tingkat desa. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui program *One Village One Product (OVOP).*

Program OVOP ini tidak hanya mencakup produk-produk hasil karya pelaku UMKM di tingkat desa seperti kerajinan tangan atau produk seni budaya, tetapi juga mencakup berbagai potensi alam yang beragam di Kabupaten Bulungan. Adapun program yang telah tereksekusi dengan baik dan tidak lagi dimuat dalam 15 program prioritas RPJMD 2025–2029 adalah Mall Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, MPP telah beroperasi di kantor PTSP Bulungan dengan lebih dari 15 tenant yang melayani berbagai kebutuhan publik, baik layanan perizinan maupun non-perizinan.

Ke depan, kami sedang merancang transformasi MPP menjadi layanan yang sepenuhnya digital. Harapannya, masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik ke MPP Bulungan, karena seluruh layanan dapat diakses dan terintegrasi secara digital. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bulungan periode 2025–2029 baik visi, misi, maupun 15 program prioritasnya merupakan kelanjutan dari arah pembangunan yang telah kami jalankan pada periode 2021–2024.

Redaksi : Kabupaten Bulungan memiliki potensi pertanian dan perikanan. Bagaimana strategi hilirisasi akan berjalan agar petani dan nelayan mendapat nilai tambah nyata?

Kalau bicara pertanian dalam arti luas, kita tidak hanya membatasi diri pada pertanian pangan semata, tetapi mencakup seluruh aspek yang terkait dengannya. Dan memang, sektor ini menjadi salah satu skala prioritas utama kita hari ini. Makanya, dalam 15 program prioritas RPJMD 2025–2029, kita kembali menghadirkan konsep Mandau Tani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian).

Melalui konsep ini, kami berharap terjadi integrasi yang utuh dari hulu hingga hilir. Program ini berjalan sejalan dengan arahan Bapak Presiden melalui Astacita. Artinya, apa yang kita gagas di Kabupaten Bulungan hari ini benar-benar *inline* dengan kebijakan nasional, sekaligus merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya. Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Bulungan juga mendapatkan dukungan lebih dari 2.000 hektare dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk optimalisasi lahan pertanian.

Di sisi lain, APBD juga memberikan subsidi melalui Dinas Pertanian, misalnya dalam bentuk pembangunan jalan-jalan pusat tani, ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sisi hulu. Namun, jika bicara hilirisasi, kami akui bahwa ini memang membutuhkan penanganan yang lebih serius dan





Gambar : Wikipedia

terstruktur. Sebagai contoh, pada tahun 2004 lalu, kami telah memberikan subsidi alat pertanian di wilayah Desa Sajau Hilir yang memang dikenal sebagai lumbung pangan Kabupaten Bulungan.

Dukungan itu tidak hanya berhenti di hulu. Di lokasi yang sama, kami juga hadirkan peralatan yang memungkinkan para petani melakukan hilirisasi terhadap hasil pertaniannya, seperti pengolahan gabah menjadi beras berkualitas.

Dari sisi pemasaran, salah satu pasar potensial yang bisa kita manfaatkan adalah ASN Kabupaten Bulungan. Saat ini, jumlah ASN dan PPPK kita mencapai lebih dari 3.000 orang. Ini bisa kita wujudkan melalui regulasi yang mendorong mereka untuk menjadi pasar tetap bagi produk pangan lokal yang dihasilkan petani kita. Itu baru dari sisi padi dan beras. Namun, seperti saya sampaikan tadi, kita bicara pertanian dalam arti luas.

Program *One Village One Product (OVOP)* yang kita dorong tidak hanya terbatas pada satu jenis produk, tetapi juga mencakup berbagai komoditas pertanian secara luas. Dalam hal ini, kami juga mendorong kepala desa untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayahnya masing-masing. Hari ini, kita sudah bisa menunjukkan hasil nyata. Misalnya di Desa Antutan dan Desa Pejalin, yang kini tidak hanya memproduksi biji kakao, tetapi juga telah masuk ke tahap pengolahan, menghasilkan produk berupa bubuk kakao maupun cokelat batangan.

Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya melalui Dinas Kehutanan, dalam kerangka perhutanan sosial. Salah satu desa yang menjadi lokus program ini adalah Desa Longsam, yang mengembangkan tanaman lengkeng. Tanaman lengkeng tersebut sudah mulai berproduksi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2019. Bahkan, pada tahun 2024 ini, saya kembali mengintervensi Dinas Pertanian untuk memperluas penanaman bibit lengkeng di Desa Longsam dan sekitarnya hingga mencapai kurang lebih 10 hektare sebagai bentuk kontribusi APBD dalam mendukung diversifikasi pertanian.

Ke depan, desain besar kita di Kabupaten Bulungan adalah mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Konsep ini kita wujudkan dalam bentuk IAD *(Integrated Area Development).* Salah satu lanskap yang menjadi fokus adalah Lanskap Kayan, yang mencakup sekitar 18 desa dengan luasan lebih dari 600.000 hektare.

Kawasan ini kita harapkan menjadi basis pengembangan OVOP, sekaligus menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang selaras dengan ekosistem dan kearifan lokal.

Redaksi : Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru memberikan peluang besar. Apa strategi Kabupaten Bulungan untuk menangkap peluang ekonomi dan investasi yang muncul dari pembangunan IKN?

Kita berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi magnet bagi Kalimantan secara umum, dan tentu saja memberikan dampak positif bagi kita di Kalimantan Utara. Secara praktis, jarak tempuh melalui penerbangan dari Kalimantan Utara ke IKN hanya sekitar satu jam. Ini merupakan peluang besar ke depan, terutama ketika IKN benar-benar beroperasi sebagai ibu kota negara yang baru. Dan tentu saja, hal ini harus kita persiapkan sejak sekarang.

Salah satu langkah yang sedang kami lakukan hari ini adalah pembangunan kawasan pangan di Bulungan ini juga bagian dari mimpi kita. Kami meyakini bahwa Bulungan memiliki potensi lahan dan kapasitas produksi pertanian yang cukup luas, sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Bulungan atau Kalimantan Utara, tetapi juga bisa berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara kelak. Itu adalah mimpi besar kami: menjadi bagian dari rantai pasok pangan bagi IKN.

Apalagi saat ini, salah satu daya tarik utama di Bulungan adalah pengembangan kawasan industri. Jika kawasan ini benar-benar berjalan dan beroperasi secara optimal, saya yakin dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya menarik investor yang ingin berinvestasi di IKN, tetapi juga membuka peluang investasi di Kalimantan Utara, khususnya di sekitar kawasan industri tersebut.

Lebih dari itu, saat ini kita juga terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Ini juga bagian dari mimpi kita dalam mewujudkan konsep pembangunan hijau dan energi baru terbarukan. Jika PLTA ini benar-benar berjalan dan berproduksi, mimpi besarnya adalah Kalimantan Utara melalui PLTA tersebut dapat menjadi penyuplai listrik yang andal, tidak hanya untuk daerah kita, tetapi juga untuk kawasan IKN dan sekitarnya

Redaksi : Apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan mimpi bersama selama lima tahun ke depan?

Kondisi masyarakat Bulungan yang beragam dalam kultur, suku, maupun agama merupakan kekayaan yang patut kita syukuri. Di tengah keberagaman ini, para orang tua kita, nenek moyang, serta para pemimpin daerah Kabupaten Bulungan telah meletakkan fondasi yang luar biasa kuat dan baik. Fondasi inilah yang harus terus kita jaga dan pastikan tetap hidup di tengah masyarakat Bulungan.

Semangat itu terangkum dalam nilai Tenguyun sebuah semangat yang menjadi identitas kita. Lambang Kabupaten Bulungan sendiri memuat kata Tenguyun, yang jika kita maknai berarti kekompakan dan persatuan. Meski beragam, ketika kita bersatu dan kompak, itulah kekuatan terbesar kita dalam membangun Bulungan. Nilai ini harus terus kita tanamkan, baik kepada generasi hari ini maupun generasi penerus yang kelak akan melanjutkan estafet pembangunan di Bulungan.

Dengan keberagaman suku dan agama yang ada, kita wajib menjaga keamanan dan kedamaian. Sebab, syarat utama untuk bisa membangun adalah persatuan, kekompakan, dan situasi daerah yang aman serta kondusif.

Sering saya sampaikan, sebesar apa pun APBD Kabupaten Bulungan, jika daerah ini tidak kondusif, tidak ada pembangunan yang bisa kita wujudkan.

Oleh karena itu, saya mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Bulungan di 74 desa, 7 kelurahan, dan 10 kecamatan untuk terus menjaga dan merawat semangat yang telah ditanamkan oleh para orang tua dan pemimpin kita terdahulu.

Jangan sampai kita mudah terpecah belah oleh isu-isu yang mengusik perbedaan agama atau suku. Di Bulungan, kita tidak lagi berbicara soal suku atau agama tertentu. Kekuatan Bulungan yang kita bangun hari ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat bukan kepentingan satu suku, bukan kepentingan satu agama, melainkan kepentingan bersama seluruh warga Bulungan, dalam semangat Tenguyun.

Tagline "Merudung Pebatun di Benuanta" memiliki makna yang sangat luar biasa. Bersama-sama kita membangun daerah ini. Ini adalah prasyarat utama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Fondasi yang kita bangun hari ini bukan lagi untuk diri kita sendiri bukan untuk saya, bukan untuk para kepala dinas, atau ASN saat ini melainkan untuk anak cucu kita 10 hingga 20 tahun ke depan. Merekalah yang akan menikmati hasil kerja keras kita hari ini.

Karena itu, fondasi ini harus kita siapkan sejak sekarang. Saya yakin, jika pesan ini terus kita sampaikan kepada masyarakat Bulungan, nilai-nilai tersebut akan menjadi tradisi yang terus dijaga dan dirawat oleh generasi penerus dalam membangun Kabupaten Bulungan. ■



Foto : Diskominfo Kab. Bulungan

"KABUPATEN BULUNGAN YANG **BERDAULAT DAN UNGGUL** MELALUI **PEMBANGUNAN HIJAU** YANG BERKELANJUTAN



Syarwani, S.Pd., M.Si.
Bupati Kabupaten Bulungan

Kilat, A.Md.
Wakil Bupati Kabupaten Bulungan

MISI RPJMD KABUPATEN BULUNGAN

MISI 1
MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL SERTA MEMILIKI DAYA SAING

MISI 2
MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN DAN MENDORONG PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN

MISI 3
MENINGKATKAN LAYANAN DASAR DAN INFRASTUKTUR YANG HANDAL DENGAN MENGEDEPANKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MISI 4
MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PERAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL YANG BERBASIS EKOLOGI

MISI 5
MENJAMIN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN MENGEDEPANKAN KONSEP PELAYANAN YANG BERPUSAT PADA MASYARAKAT, SERTA ADIL DAN MERATA

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD KABUPATEN BULUNGAN**

TAHAP 1 (2026)
Peningkatan dan Pemantapan Kualitas Potensi Unggulan Wilayah dengan Pemanfaatan Ekonomi Digital

TAHAP 2 (2027)
SDM Handal & Berdaya Saing

TAHAP 3 (2028)
Layanan Mantap Handal & Terjangkau

TAHAP 4 (2029)
Ekonomi Maju dan Sejahtera

TAHAP 5 (2030)
Bulungan Unggul, Berdaulat dan Berkelanjutan



KONSOLIDASI FISKAL, DIGITALISASI PENDIDIKAN, DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN

Memasuki masa jabatan pertama, Wali Kota Tarakan dihadapkan pada dua ujian berat sekaligus, warisan kewajiban keuangan senilai Rp 480 miliar dan mewabahnya pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian daerah. Namun, dengan komitmen kuat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, serta inklusif, pemerintah daerah berhasil menurunkan utang hingga tinggal sekitar Rp100 miliar sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp57 miliar menjadi Rp250 miliar.

Dalam wawancara eksklusif ini, Wali Kota Tarakan memaparkan strategi kepemimpinannya dalam menghadapi krisis, upaya pemerataan pembangunan melalui digitalisasi pendidikan berbasis Google, penguatan peran Tarakan sebagai kota jasa dan perdagangan strategis, serta komitmennya menjaga kerukunan antarsuku dan antar agama di tengah masyarakat yang majemuk.

Redaksi : Dalam periode pertama kepemimpinan bapak, apa kira-kira momen yang paling berkesan yang Bapak alami?

Begitu saya mulai menjabatkan, saya langsung dihadapkan dengan persoalan yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu. Pertama harus membayar sekitar 480 milliar, setelah itu ditambah lagi COVID-19. Itu yang saya kira paling menjadi sebuah pembelajaran terbesar dan juga merupakan tantangan kepemimpinan terbesar saya.

Tapi bukan hanya kami, saya rasa juga mungkin untuk seluruh kepala daerah, bahkan kepala negara di seluruh dunia. Itu yang membuat kita menjadi banyak belajar, dan saya kira banyak merubah pola kerja, baik pola kerja di birokrasi termasuk juga di masyarakat. Dan itu menjadi sebuah momentum cukup berat, saya kira untuk perjalanan kepemimpinan dalam satu periode pertama itu sekaligus sebenarnya juga menjadi bagian pembelajaran yang cukup berarti untuk periode kedua.

Redaksi : Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama memimpin dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?

Tadi saya sampaikan bahwa tantangan terbesar di awal masa jabatan adalah dua hal sekaligus. Pertama, warisan kewajiban keuangan masa lalu yang harus diselesaikan; kedua, mewabahnya pandemi COVID-19. Pada masa itu, pemerintah daerah dihadapkan pada beban ganda: di satu sisi, ada kewajiban pembayaran yang cukup besar, sementara di sisi lain, pengeluaran juga meningkat signifikan untuk penanganan pandemi.

Namun, di tengah situasi itu, pendapatan daerah justru menurun drastis karena hampir seluruh sektor ekonomi lumpuh. Menghadapi kondisi tersebut, kami melakukan penataan ulang terhadap

seluruh rencana dan program pembangunan yang sebelumnya telah tersusun rapi. Kami menyusun roadmap pembangunan baru, tetapi tetap berpijak pada visi, misi, dan tujuan akhir yang telah ditetapkan sejak awal.

Kami tidak mengubah arah, melainkan menyesuaikan strategi dan langkah pelaksanaannya. Salah satu langkah utama adalah efisiensi anggaran. Kami memangkas kegiatan yang masih bisa ditunda, termasuk kegiatan seremonial dan hiburan di lingkungan pemerintah daerah. Upacara-upacara tetap dilaksanakan, tetapi peserta dan kemeriahannya dikurangi agar lebih fokus pada esensinya. Saya sendiri memberikan contoh langsung dengan menerapkan penghematan dalam keseharian, dan meminta seluruh jajaran untuk melakukan hal yang sama, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus hemat bersama.

Di sisi lain, kami terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu diketahui, Tarakan tidak lagi memiliki sumber daya alam seperti tambang minyak dan gas yang dulu pernah menjadi andalan. Pendapatan dari dana bagi hasil pun tergolong paling kecil di antara kabupaten/kota se-Kalimantan Utara. Karena itu, kami memperkuat posisi Tarakan sebagai kota jasa, perdagangan, pariwisata, dan kota MICE *(Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition).*

Alhamdulillah, PAD Kota Tarakan yang awalnya hanya sekitar Rp 57 miliar saat saya mulai menjabat, berhasil meningkat menjadi Rp 250 miliar di akhir periode, hampir lima kali lipat. Peningkatan ini bukan berasal dari penambahan objek pajak baru, melainkan dari optimalisasi potensi yang sudah ada, penutupan kebocoran pendapatan melalui sistem pembayaran *cashless,* serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat awal menjabat, BUMD di Tarakan hanya berjumlah dua: PDAM dan satu perusahaan daerah yang nyaris mati suri. Kami kemudian menghidupkan kembali dan membentuk lima Perusahaan Umum Daerah (Perumda), antara lain Perumda Tirta Alam (air bersih), Perumda Agro Bisnis (pertanian), dan Perumda Energi (pengelolaan sampah, layanan medis, dan sebagainya). Meski belum semuanya sehat secara finansial, kontribusi mereka terhadap PAD cukup signifikan.

Berbekal strategi ini, utang warisan sebesar Rp480 miliar berhasil kami tekan hingga tersisa sekitar Rp100 miliar tanpa menambah pinjaman baru. Kami benar-benar belanja sesuai kemampuan keuangan daerah, fokus pada program prioritas, dan tidak “melirik kiri-kanan”. Tambahan program hanya kami terima jika berasal dari pusat atau OPD terkait, dan tetap diarahkan untuk mendukung visi-misi serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Alhamdulillah, hampir 90% program yang kami canangkan baik dalam kampanye maupun RPJMD yang dijabarkan ke dalam



“Komitmen saya sebagai kepala daerah untuk memastikan digitalisasi di sektor pendidikan berjalan dengan baik. Tentu, hal ini didukung dengan alokasi anggaran yang memadai termasuk untuk kebutuhan *bandwidth* dan infrastruktur pendukung lainnya.

dr. H. Khairul, M.Kes.
Walikota Tarakan

program Perangkat Daerah berhasil diwujudkan. Contohnya, program PDAM gratis yang awalnya ditargetkan untuk 10.000 sambungan, justru terealisasi hingga 32.000 sambungan, melebihi 100 % target. Program perumahan DP 0% dan Dana RT juga tetap berjalan meski sumber daya terbatas. Hasil kerja ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah mencapai lebih dari 87% di akhir masa jabatan. Sebuah indikator bahwa kebijakan yang kami ambil dianggap relevan, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Redaksi : Menurut Bapak apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Tarakan pada saat ini?



Pelabuhan Malundung (Tribun Kaltara)

Keunggulan kompetitif kami memang terletak pada posisi strategis yang dimiliki. Tarakan berada di jantung ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II)yang merupakan jalur pelayaran penting, khususnya dalam konteks perdagangan maritim, sebagaimana juga dialami oleh wilayah seperti Batam. Inilah keunggulan pertama kami, lokasi geografis yang sangat strategis.

Kedua, secara historis, Tarakan memang telah memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap sejak awal berdirinya. Sejak masa kota administratif hingga menjadi kotamadya, Tarakan telah ditetapkan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Sentra-sentra ekonomi memang sengaja dikembangkan di sini sejak dulu, dan kondisi itu masih berlangsung hingga saat ini.

Selanjutnya, karena berada di ALKI II, hampir seluruh pelabuhan dan bandar utama di wilayah ini memang berlokasi di Tarakan. Inilah aset yang benar-benar kami optimalkan. Kami sadar bahwa Tarakan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain. Modal utama kami saat ini adalah sektor jasa dan perdagangan. Bahkan, kami kini sedang mengarahkan Tarakan menjadi Kota MICE *(Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition).*

Di samping itu, Tarakan juga memiliki basis industri, meski skalanya tidak sebesar di daerah lain seperti Bulungan. Sejak dulu, industri sudah berkembang di sini—mulai dari industri kayu lapis *(plywood), cold storage,* hingga pabrik pulp dan kertas yang kini masih beroperasi. Secara geografis, kami memang diuntungkan, dan hal ini juga didukung oleh keberadaan kawasan industri, meski tidak seluas di tempat lain.

Kami telah membagi kawasan industri ke dalam beberapa zona: wilayah barat, utara, dan timur. Hanya wilayah tengah yang sengaja tidak dikembangkan untuk industri. Dalam tata ruang kota, wilayah tengah dan sebagian barat memang kami arahkan sebagai pusat bisnis dan kawasan permukiman padat. Wilayah utara kami dorong untuk pengembangan industri berbasis Minapolitan, sekaligus permukiman. Bahkan, ke depan, wilayah ini direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pulau.

Saat ini, jujur saja, Kecamatan Tarakan Utara masih relatif tertinggal dibanding kecamatan lain. Untuk memicu percepatan pertumbuhan di sana, kami menargetkan pada tahun 2027 kantor walikota sudah dapat dipindahkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur lebih difokuskan pada sektor pertahanan, pariwisata, serta industri berat. Wilayah barat dikembangkan untuk industri menengah hingga skala sedang,



Gambar : Traveling.id/frontdesk.id



sedangkan utara khusus untuk industri Minapolitan.

Semua rencana ini sedang kami siapkan secara matang. Kami juga berharap Tarakan dapat menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsep-konsep tata ruang dan pengembangan wilayah ini sebenarnya sudah kami susun sejak lama, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan pembangunan misalnya jika semua aktivitas hanya dikonsentrasikan di wilayah tengah dan barat. Bahkan, kami telah merancang sejumlah infrastruktur pendukung, seperti *coastal ring road,* sistem suplai energi, serta penyediaan air bersih. Semua langkah ini dirancang secara bertahap untuk mengantisipasi peningkatan populasi dan perkembangan industri di Kota Tarakan ke depan.

Redaksi : Pemkot Tarakan menggandeng Google untuk mewujudkan Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) kota Tarakan. Bagaimana Pemkot Tarakan memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak transformasional bagi dunia pendidikan di Tarakan?

Sebenarnya, program digitalisasi di sekolah-sekolah sudah berjalan. Saat ini, ada empat sekolah yang kami tunjuk sebagai *pilot project.* Meski belakangan ini beberapa sekolah lain mulai menyusul, fokus utama kami saat ini tetap pada pemenuhan kebutuhan laptop Chromebook di keempat sekolah tersebut.

Keempat sekolah itu adalah SD Negeri 003, SD Negeri 041, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 5. Untuk SMP Negeri 5, stok Chromebook-nya sudah mencukupi. Namun, SMP Negeri 3 masih kekurangan 13 unit, SD Negeri 041 kekurangan 56 unit, dan SD Negeri 003 kekurangan 43 unit. Rencananya, kekurangan ini akan kami selesaikan melalui perubahan anggaran tahun ini.



Dalam hal pelatihan guru atau tutor, kami beruntung karena di Tarakan sudah ada tutor level 1 yang telah tersertifikasi. Mereka siap membina guru-guru lainnya, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan pelatih dari luar.

Mengapa kami fokus pada empat sekolah ini terlebih dahulu? Ini merupakan pembelajaran dari pengalaman selama masa pandemi COVID-19, ketika pembelajaran digital mulai diterapkan secara masif. Dari situ, kami melihat banyak manfaat yang bisa dikembangkan. Guru bisa belajar cara mengajar secara digital, siswa mendapatkan akses pembelajaran yang lebih luas, bahkan orang tua pun bisa ikut memantau proses pendidikan anaknya.

Upaya ini merupakan komitmen saya sebagai kepala daerah untuk memastikan digitalisasi di sektor pendidikan berjalan dengan baik. Tentu,

hal ini didukung dengan alokasi anggaran yang memadai termasuk untuk kebutuhan *bandwidth* dan infrastruktur pendukung lainnya.

Alhamdulillah, infrastruktur digital di Tarakan relatif sudah baik. Di Tarakan hampir tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet. Hampir seluruh sekolah sudah terhubung ke jaringan internet.

Tantangan utama saat ini tinggal pada pelatihan tutor. Memang belum semua sekolah mendapatkan pelatihan tersebut, sehingga pilot project ini menjadi ujung tombak. Setelah keempat sekolah ini siap, kami akan dorong perluasan ke sekolah-sekolah lain agar tidak terjadi kesenjangan akses digital antarsekolah.

Sebenarnya, persiapan di keempat sekolah ini sudah berjalan. Yang tersisa hanyalah melengkapi kebutuhan laptopnya. Bahkan, seperti yang disebutkan tadi, SMP Negeri 5 sudah mencukupi kebutuhannya, sementara yang lain masih perlu tambahan.

Kami juga berharap, ke depan, setidaknya satu kecamatan memiliki satu sekolah percontohan digital. Dari keempat sekolah *pilot project* saat ini, ternyata ada satu kecamatan yang belum terwakili, karena dua sekolah berada di kecamatan yang sama. Oleh karena itu, kami sedang mengupayakan agar kecamatan yang belum terjangkau ini juga segera masuk dalam program ini.

Cikal bakal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Pengadaan perangkat dilakukan secara bertahap, baik melalui APBN maupun APBD. Namun, belakangan program pengadaan dari pusat sempat terhenti.

Karena itu, kami berinisiatif menyelesaikan sendiri pemenuhan kebutuhan di keempat sekolah tersebut. Insya Allah, ini menjadi prioritas yang saya kawal langsung, mulai dari proses pengadaan hingga pelatihan. Saya bahkan sudah memanggil para tutor untuk memastikan kesiapan mereka.

Ke depan, tutor-tutor lokal inilah yang akan melatih guru-guru di sekolah-sekolah lain. Mereka akan menjadi agen perubahan utama dalam transformasi digital pendidikan di Tarakan tanpa perlu lagi mengandalkan pelatih dari luar daerah.

Redaksi : Apakah guru-guru di sekolah yang menjadi kandidat KSRG sudah mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pemanfaatan teknologi Google untuk pembelajaran?

Kalau keempat sekolah *pilot project* ini sebenarnya sudah siap—mereka sudah menjalani pelatihan, dan SDM-nya pun sudah siap. Yang masih kurang hanyalah laptop Chromebook-nya. Kemarin, kekurangannya masih dalam hitungan puluhan unit.

Saya lihat, dalam usulan APBD Perubahan kemarin, Dinas Pendidikan sudah mengajukan anggaran untuk pelengkapannya. Namun, karena saat ini sedang ada permasalahan di tingkat pusat terkait pengadaan Chromebook dan hal ini sedang menjadi sorotan saya ingin memastikan betul-betul sebelum eksekusi dilakukan, agar kita tidak ikut terkena dampaknya.
Meski begitu, anggarannya sudah kami siapkan dan standby dalam APBD Perubahan. Secara SDM, keempat sekolah itu benar-benar siap, bahkan sudah mulai menjalankan pembelajaran digital. Sekarang, justru sedang dicoba replikasi ke sekolah-sekolah lain.

Saat saya tanya kemarin, keempat sekolah tersebut menyatakan kesiapannya. Mereka bahkan sudah mulai menjalankan programnya, hanya saja infrastruktur berupa laptop Chromebook masih belum lengkap. Untuk sumber daya manusianya mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa semuanya sudah siap. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan bahwa kini tidak hanya empat sekolah lagi, tapi sudah sekitar 10 sekolah yang mulai masuk dalam program ini. Namun, sekolah-sekolah tambahan tersebut masih dalam tahap pelatihan SDM.

Sebelum memasukkan sekolah ke dalam program, kami juga mengevaluasi minat dan kesiapan para gurunya, karena pada akhirnya, kunci keberhasilan transformasi digital ini ada pada guru sebagai pelaku utama di lapangan.
Jadi, kembali ke empat sekolah awal mereka benar-benar sudah siap dari kepala sekolah, guru, hingga siswa. Programnya pun sudah berjalan. Satu-satunya kendala hanya pada ketersediaan laptop Chromebook. Karena itulah, mereka layak menjadi *pilot project,* bukan hanya direncanakan, tapi sudah benar-benar dijalankan.

Redaksi : Apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Tarakan dalam mewujudkan mimpi bersama selama lima tahun ke depan?

Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan adalah mari kita selalu kompak dan bersatu, karena itulah kunci utama dalam membangun kota ini. Seperti pantun yang sering saya sampaikan "Ayu Ting Ting beranak satu, yang penting kita bersatu," dan "Ayu Ting Ting naik gerobak, yang penting kita kompak."

Pengalaman membuktikan bahwa tanpa persatuan, kondisi kota menjadi tidak stabil dan ketidakstabilan itu pasti akan menghambat laju pembangunan. Selama ini, kami terus berupaya menjadikan Tarakan sebagai kota yang majemuk dan inklusif, yang mampu mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakatnya mulai dari suku Jawa, Tidung, Banjar, Dayak, hingga Bali.

Bahkan, dalam sejarah Tarakan, mungkin baru kali ini kita memiliki pejabat kepala dinas yang berasal dari suku Dayak dan Bali. Ini adalah bukti nyata bahwa keragaman bukan penghalang, melainkan kekuatan.
Kami juga senantiasa menjaga kerukunan antarumat beragama. Bila muncul persoalan di internal umat, kami tidak diam, kami ajak duduk bersama untuk mencari solusi secara musyawarah. Prinsipnya sederhana: jika ada masalah, kita bicarakan bersama, bukan saling menyalahkan.

Kondusivitas Kota Tarakan selama satu periode terakhir termasuk saat menghadapi pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari dua tahun dapat terjaga berkat kekompakan dan saling pengertian di antara kita semua. Memang, tidak semua orang bisa sepakat dalam setiap hal—dan itu wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, selama mayoritas tetap kompak, roda pembangunan tetap bisa berjalan.

Yang terpenting, pesan persatuan ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya diucapkan dalam kata-kata. Jika kita mengajak masyarakat bersatu, maka bantuan, kebijakan, dan perhatian pemerintah harus diberikan secara adil kepada semua pihak tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang apa pun.

Dengan persatuan yang tulus dan dijalankan bersama, insyaallah setiap tantangan yang kita hadapi akan mampu kita selesaikan bersama pula. ■



Gambar : Wikipedia

"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI **KOTA CERDAS** YANG BERTUMPU PADA **SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN, DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**".



dr. H. Khairul, M.Kes
Walikota Kota Tarakan

Ibnu Saud Is
Wakil Walikota Kota Tarakan

MISI RPJMD KOTA TARAKAN

MISI 1
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

MISI 2
MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG HANDAL

MISI 3
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI DUKUNGAN KEMUDAHAN BERUSAHA YANG BERKEADILAN DAN BERTUMPU PADA SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN, EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI KERAKYATAN (UMKM)

MISI 4
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF SERTA MENJAGA STABILITAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN KOTA

MISI 5
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN DAN TANGGUH MENGHADAPI BENCANA

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD KOTA TARAKAN**

TAHAP 1 (2026)
Peningkatan Daya Saing Daerah yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif

TAHAP 2 (2027)
Percepatan pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

TAHAP 3 (2028)
Pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

TAHAP 4 (2029)
Pemantapan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

TAHAP 5 (2030)
Terwujudnya Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

MEWUJUDKAN MALINAU MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Malinau dalam menyejahterakan masyarakat.

Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Malinau.

Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah "Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional".

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Misi 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal
3. Misi 3 : Peningkatan Infrastruktur
4. Misi 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
5. Misi 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
6. Misi 6 : Pemberdayaan Desa

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 yaitu



Gambar : Wikipedia





Gambar : Wikipedia

Tahap I Tahun 2026 Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat dengan strategi diantaranya Perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berbasis potensi lokal berbasis penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan responsif terhadap kerentanan bencana, perubahan iklim, dan dinamika sosial-ekonomi.

Tahap II Tahun 2027 Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan dengan strategi diantaranya Peningkatan profesionalitas pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan ASN, penguatan etika dan integritas, serta edukasi pemerintahan berbasis elektronik

Tahap III Tahun 2028 Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian dengan strategi diantaranya Peningkatan kapasitas SDM lokal yang kompeten dan berintegritas, pengembangan industri pengolahan yang mengutamakan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat berbasis prinsip saling menguntungkan pengendalian tata ruang yang memperhatikan kearifan lokal dan keberagaman budaya

Tahap IV Tahun 2029 Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan dengan melakukan startegi antara lain Penerapan standar lingkungan dan teknologi ramah lingkungan pada pelaku usaha untuk mengurangi risiko bencana.

Tahap V Tahun 2030 Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan strategi diantaranya Penanaman pendidikan karakter yang menjunjung toleransi dan persatuan, pelestarian serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai penguat identitas Kabupaten Malinau.

Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Berikut disajikan Proyek Strategis Kepala Daerah yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.



Gambar : Wikipedia

1. WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU

Merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar Malinau Maju periode pertama. Program WM Maju periode kedua menekankan pada penyediaan prasarana dan sarana Pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau tenaga pendidik, peningkatan kualitas intelektual serta karakter murid atau pelajar pada berbagai tingkatan, yang memiliki nilai moral dan perilaku yang positif, terampil serta berbudaya.

Tidak hanya pada dimensi Pendidikan, untuk unsur Kesehatan, program Wajib Belajar Malinau Maju juga berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan Kesehatan, penyediaan tenaga medis dan kesehatan yang merata dan ada pada semua layanan kesehatan pada tingkat desa hingga kecamatan, tersedianya fasilitas layanan Kesehatan yang memadai, peningkatan layanan jaminan sosial bagi masyarakat serta peningkatan kemampuan tenaga medis/Kesehatan melalui berbagai jenjang Pendidikan.

Melalui “Wajib Belajar Malinau Maju”, pemerintah Kabupaten Malinau dapat mencetak generasi muda yang lebih terdidik dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan. Program ini terkait dengan Misi “Pengembangan Sumber Daya Manusia”

2. PROGRAM “DESA SARJANA UNGGUL”

Merupakan lanjutan dari program Desa Sarjana periode pertama. Pada periode kedua, selain terus memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kualitas yang baik pada setiap desa di Kabupaten Malinau.

Program Desa Sarjana Unggul diarahkan untuk pemanfaatan lulusan Program Desa Sarjana sebagai tenaga Terampil Desa dengan memberikan keterampilan tambahan selama melaksanakan pengabdian di desa. Tenaga Terampil Desa juga diarahkan untuk memiliki nilai enterpreneurship dan mampu mandiri setelah mengabdi di desa masing-masing.

Program “Desa Sarjana Unggul” merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang lebih berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dengan mendukung generasi muda untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi, program ini berperan penting dalam menciptakan pemimpin dan inovator masa depan yang akan memajukan desa-desa di Kabupaten Malinau. Program ini terkait dengan Misi “Pemberdayaan Desa”

3. PROGRAM “PESAT (PERTANIAN SEHAT)”

Merupakan pengembangan dari Program Rasda Plus. Program Pertanian Sehat berorientasi pada pemenuhan infrastruktur pertanian, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan petani, dan pemanfaatan dan pemberdayaan produk lokal.

Program Pertanian Sehat merujuk pada berbagai inisiatif, kebijakan, dan tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian. Sektor pertanian mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Program Pertanian Sehat ini tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan pertanian, dengan tujuan akhir untuk mencapai keberlanjutan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Program ini terkait dengan Misi "Peningkatan Infrastruktur" dan "Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

4. PROGRAM "SAGET (SMART GOVERMENT)"

Program transformasi digital pemerintah Kabupaten Malinau adalah inisiatif yang diambil untuk mengadopsi teknologi digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Program ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Program transformasi digital pemerintah Kabupaten Malinau adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Program ini terkait dengan Misi "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani" dan "Pemberdayaan Desa"

5. PROGRAM "MILENIAL MANDIRI"

Program Milenial Mandiri adalah lanjutan dari program pada periode sebelumnya. Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan generasi muda, khususnya kelompok milenial, agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan potensi generasi milenial di Malinau agar mereka bisa berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah dan memiliki kehidupan yang mandiri secara finansial.

Dengan adanya program "Milenial Mandiri", diharapkan generasi muda di Kabupaten Malinau bisa lebih berdaya, kreatif, dan mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan daerah dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Program ini terkait dengan Misi "Pengembangan Ekonomi Lokal".

Pelaksanaan pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 dirancang secara bertahap dan terukur, mulai dari penguatan SDM dan ekonomi lokal hingga transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Program-program unggulan seperti Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, PESAT (Pertanian Sehat), SAGET (Smart Government), dan Milennial Mandiri menjadi wujud nyata dari janji kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tantangan zaman. Setiap tahapan dirancang untuk saling memperkuat, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan.



Gambar : Wikipedia

"TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN **BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN** MENUJU KABUPATEN MALINAU **YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA** BERLANDASKAN **NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** DIDUKUNG DENGAN **PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL"**



Wempi W. Mawa, SE., M.H.
Bupati Kabupaten Malinau

Jakaria, S.E., M.Si.
Wakil Bupati Kabupaten Malinau

MISI RPJMD KABUPATEN MALINAU

MISI 1
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MISI 2
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

MISI 3
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

MISI 4
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

MISI 5
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI

MISI 6
PEMBERDAYAAN DESA

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD KABUPATEN MALINAU**

TAHAP 2 (2027)
Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan

TAHAP 4 (2029)
Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan



TAHAP 1 (2026)
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat

TAHAP 3 (2028)
Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian

TAHAP 5 (2030)
Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera



NUNUKAN DI GARIS DEPAN : MEMBANGUN DARI PERBATASAN MENUJU KEMAKMURAN

Di ujung utara Kalimantan, Kabupaten Nunukan berdiri tegak sebagai garda terdepan Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan luas wilayah lebih dari 14 ribu km² dan garis perbatasan sepanjang 689 km, daerah ini menyimpan potensi besar sekaligus tantangan kompleks. Dalam wawancara ini, Bupati Nunukan memaparkan strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan IPM, dan mendorong ekonomi berbasis potensi lokal.

Redaksi : Menurut Bapak, apa saja keunggulan kompetitif utama Kabupaten Nunukan selama ini?

Sumber daya alam kita memang terbesar di sektor rumput laut. Jika sektor rumput laut saja bisa dimaksimalkan di Kabupaten Nunukan, maka taraf hidup masyarakat kita pasti akan semakin meningkat. Di daerah pesisir Kabupaten Nunukan, hampir setiap pantai dihuni oleh pelaku usaha rumput laut. Di sana, semua unsur masyarakat terlibat ada perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak. Pada tahun 2025 ini saja, Kabupaten Nunukan mampu mengirim sekitar 5.000 ton rumput laut ke Sulawesi. Namun pertanyaannya, apa kontribusi pemerintah terhadap para pelaku usaha di sektor rumput laut ini? Kita semua tahu bahwa harga rumput laut ditentukan oleh pasar dunia, bukan oleh pemerintah. Meski demikian, tetap diperlukan peran dan intervensi pemerintah.



Contohnya, jika tidak ada intervensi pemerintah di Kabupaten Nunukan, banyak pihak luar termasuk dari pabrik masuk begitu saja, lalu seenaknya memegang rumput laut milik masyarakat dan berkata, "Harganya cuma segini." Akibatnya, harga di tingkat petani jatuh drastis, padahal harga di pasar dunia tidak anjlok sedemikian rupa. Turun atau naiknya harga di pasar global biasanya tidak terlalu ekstrem.

Beberapa bulan sebelum saya menjabat, harga rumput laut di Nunukan sempat anjlok seperti yang saya sampaikan tadi. Mengapa? Karena banyak pihak luar masuk, termasuk perwakilan pabrik, langsung mendatangi petani, memegang hasil panennya, lalu menawar dengan harga sangat rendah. Akibatnya, harga di lapangan jatuh hingga sempat menyentuh kisaran Rp 6.000 – Rp 7.000, bahkan sempat di angka Rp 8.000 – Rp 10.000 per kilogram. Banyak petani dan pengusaha kecil yang akhirnya berhenti menanam atau mengikat rumput laut karena tidak lagi menguntungkan.

Sebagai pemerintah daerah, saya langsung mengambil langkah. Kami melalui Perusahaan Daerah (Perusda) berkunjung ke salah satu pabrik pengolahan rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan. Di sana, kami menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS), sekaligus meminta kuota khusus untuk pengambilan rumput laut dari Kabupaten Nunukan. Hasilnya, pabrik tersebut memberikan harga yang lebih adil dan menetapkan kuota pembelian melalui Perusda kami. Perlahan-lahan, harga rumput laut di Nunukan mulai pulih dan terus naik.

Hingga hari ini, harga rumput laut di Kabupaten Nunukan sudah mencapai Rp14.500 per kilogram. Alhamdulillah, masyarakat kami kini kembali bergairah, mulai lagi mengikat rumput laut, turun ke laut, dan menanam bibit baru. Inilah langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan untuk melindungi dan memajukan sektor rumput laut di Kabupaten Nunukan.

Redaksi : Nunukan berada di wilayah strategis perbatasan. Bagaimana Bupati melihat tantangan aktivitas ilegal dan apa kebijakan pencegahan yang akan diutamakan?

Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu kota dan empat kabupaten. Dari keempat kabupaten tersebut, dua di antaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dan yang paling banyak titik perbatasannya adalah Kabupaten Nunukan.

Kondisi geografis seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait isu keamanan yang tadi disampaikan seperti peredaran narkotika dan jalur masuk lalu lintas ilegal. Kabupaten Nunukan memang memiliki banyak "jalan tikus." Saat kami tutup di satu titik, muncul lagi di titik lain. Tutup di sini, muncul di sana. Ini menjadi pekerjaan rumah yang terus-menerus.

Lalu, langkah apa yang kami lakukan? Saya secara konsisten terus berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kami rutin menggelar *coffee morning* sebuah forum diskusi informal untuk membahas dan menjaga wilayah kami dari ancaman peredaran narkoba, khususnya melalui jalur-jalur masuk tersebut.

Sebenarnya, peredaran narkobanya tidak terjadi di sini, tapi Kabupaten Nunukan menjadi pintu masuk utama menuju daerah-daerah lain baik kabupaten, kota, bahkan sampai ke Sulawesi. Oleh karena itu, kami terus memperketat pengawasan di semua pintu masuk. Setiap barang yang masuk benar-benar kami pastikan aman.

Kami berkoordinasi erat dengan DanSatgas, pihak Kepolisian, TNI AL (Lanal), dan instansi terkait lainnya. Tujuannya satu, memastikan semua barang yang masuk diperiksa secara ketat dan tidak ada barang terlarang yang lolos.

Koordinasi dan komunikasi lintas sektor ini kami lakukan secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, ada juga tantangan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Banyak TKI yang dipulangkan dari Malaysia kadang dalam kondisi bermasalah dan mereka kembali ke wilayah kami, terutama melalui pelabuhan di Nunukan.



Gambar : Kompas

Ini juga menjadi persoalan serius. Terkadang, mereka diusir dari Tawau dan langsung dihalau ke Indonesia, masuk lewat sini. Bahkan, dokumen mereka sering "mati" atau tidak berlaku lagi, sehingga mereka tidak bisa bekerja kembali di Malaysia.

Ketika mereka tiba di sini, kami sudah siapkan penampungan yang layak dan fasilitasi untuk memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing. Namun, kenyataannya, banyak yang justru tidak mau pulang. Mereka malah mengurus ulang dokumen, lalu kembali lagi ke Malaysia secara tidak resmi.

Inilah tantangan yang terus kami hadapi. Baru-baru ini saja, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani datang langsung memantau situasi di pelabuhan kami. Ini menunjukkan bahwa isu ini memang kompleks dan memerlukan penanganan bersama.

Meski demikian, kami tetap menjaga komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan semua pihak terkait—karena hanya dengan kerja sama lintas sektor, kami bisa menjaga wilayah perbatasan ini dengan lebih baik.

Redaksi : Apa strategi Bupati dalam menjawab ketimpangan akses infrastruktur antara desa dan kota, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan

Perlu saya sampaikan bahwa beberapa penyebab ketimpangan terjadi diantaranya dikarenakan anggaran pembangunan sering kali difokuskan atau terkonsentrasi di kota, kondisi geografis yang sulit sehingga logistik mahal dan akses teknologi dan digital yang rendah.

Adapun Strategi yang saya lakukan adalah mengakselerasi pembanguan infrastruktur pendukung konektivitas penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui kebijakan membangun dasar penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah (termasuk desa dan kota).


Gambar : Kabar Nunukan

Kemudian Fokus pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan termasuk perbaikan jalan-jalan desa terpencil dan perbatasan, selain itu memperkuat layanan dasar pendidikan, kesehatan air bersih dan listrik serta Kolaborasi pendanaan pemerintah Pusat (melalui koordinasi BNPP), Provinsi dan daerah bahkan sumber pembiaayaan melalui CSR.

Upaya-upaya diatas telah saya konkritkan melalui 17 Arah baru menuju perubahan yang menjadi program prioritas saya, secara khusus point ke 4 dimana saya harus memastikan dan mengawal pembangunan jalan 50 KM jalan penghubung kecamatan dan desa disamping infrastruktur dasar lainnya. Di Kabupaten Nunukan, kita memiliki 21 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa. Wilayah kita memiliki kondisi geografis yang sangat beragam bahkan cukup sulit karena dikelilingi pulau dan lautan.

Menghadapi tantangan ini, tim kami kemudian merancang sebuah program strategis: "1 Kecamatan, 1 Unit Alat Berat." Alhamdulillah, pada tahun 2025 ini kita telah menganggarkan 5 unit alat berat. Artinya, dalam satu periode kepemimpinan saya, jika konsisten mengalokasikan 5 unit per tahun, maka dalam 5 tahun kita bisa menyiapkan 25 unit, lebih dari cukup untuk menjangkau seluruh 21 kecamatan.

Tujuan utama program ini adalah mempercepat penanganan darurat di wilayah-wilayah terpencil. Misalnya, ketika terjadi putus jalan di suatu kecamatan, seperti yang sering terjadi di daerah daratan Kalimantan, alat berat yang sudah ditempatkan di kecamatan tersebut bisa langsung digerakkan untuk penanganan awal. Tidak perlu menunggu intervensi dari kabupaten melalui APBD terlebih dahulu.

Dengan begitu, respons penanganan menjadi lebih cepat dan efektif. Ini adalah bentuk *quick response* yang benar-benar hadir di tingkat paling bawah. Memang, inilah titik lemah yang selama ini kurang terpikirkan dan kini kita mulai perbaiki. Jadi, program ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kesiapsiagaan dan pemerataan akses layanan dasar di seluruh pelosok Kabupaten Nunukan.

Redaksi : Nunukan mencatat IPM terendah di Kalimantan Utara. Langkah konkret apa yang akan Bupati ambil untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan?

Wujud komitmen saya selaku Bupati bersama Wakil Bupati untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah dengan menempatkan SDM yang berkualitas sebagai Misi 1 dalam RPJMD 2025-2029 yaitu Peningkatan Kualitas SDM yang cerdas, sehat dan berkarakter. IPM Kabupaten Nunukan tahun 2024 mencapai 69,27 point atau kategori sedang yang dibentuk dari sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.





Dengan nilai IPM terendah di Kalimantan Utara langkah konkrit yang saya ambil untuk menjawab peningkatan IPM tersebut yakni saya fokuskan di 17 arah baru menuju perubahan yang menjadi program prioritas saya. Sektor pendidikan, saya memfokuskan untuk wajib belajar 13 tahun (mulai dari PAUD hingga sekolah menengah pertama) agar semua anak usia sekolah menyelesaikan sekolahnya. Kemudian upaya mendorong perluasan akses pendidikan kesetaraan paket A, B dan C.

Pemerataan akses pendidikan antar desa/kota, perbaikan sekolah-sekolah yang ada dengan melengkapi sarana dan prasarananya khusus daerah terpencil dan pedalaman dan memberikan bantuan seragam kepada semua sekolah bahkan beasiswa secara gratis dan saya telah berfikir kedepan bahwa sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang kemajuan suatu daerah sehingga saya memberikan akses beasiswa kepada putra-putri di 21 kecamatan untuk kuliah di Universitas Hasanudin dengan berbagai disiplin ilmu sehingga ketika selesai kuliah anak-anak tersebut kembali untuk mengabdi di Kabupaten Nunukan.

Terobosan lain membangun kerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan beasiswa stimulus bagi mahasiswa berprestasi dan miskin serta memberikan bantuan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya. Saya juga mendukung program strategis nasional dari Bapak Presiden yakni rencana pembangunan sekolah rakyat, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak miskin yang tidak bersekolah diusia sekolah di Kabupaten Nunukan.

Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan penguatan kurikulum yang relevan juga menjadi fokus saya. Terobosan inovasi yang saya dan bapak Wakil Bupati lakukan yakni “Desa Cerdas” melalui pendidikan yang merata dan berkualitas dimana 10 % Dana Desa dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan formal di 232 desa di Kabupaten Nunukan

Sektor kesehatan, saya bersama Wakil Bupati berupaya meningkatkan layanan dan mutu

> ***Terobosan inovasi yang saya dan bapak wakil Bupati lakukan yakni “Desa Cerdas” melalui pendidikan yang merata dan berkualitas dimana 10 % Dana Desa dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan formal di 232 desa di Kabupaten Nunukan.***
>
> **H. Irwan Sabri, S.E.**
> **Bupati Nunukan**

kesehatan baik melalui penyediaan infrastruktur kesehatan hingga ke kecamatan-kecamatan, dan meng*upgrade* 3 rumah sakit pratama yang ada di Kabupaten Nunukan secara bertahap melalui upaya pemenuhan tenaga medis khususnya dokter spesialis, penguatan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan dasar (posyandu dan puskesmas).

Sektor perekonomian saya dan Wakil Bupati memfokuskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur perekonomian untuk mobilisasi distribusi barang dan jasa meliputi pembangunan jalan, jembatan serta dermaga agar desa lebih mudah terhubung ke pusat pelayanan dan pasar. Kemudian penyediaan infrastruktur digital yakni akses internet agar warga bisa mengakses informasi pendidikan dan peluang usaha digital serta pemenuhan infrastruktur fasilitas publik dasar yakni listrik, air bersih dan sanitasi.

Selanjutnya upaya pemberdayaan masyarakat akan ditingkatkan melalui pemberian bantuan kepada petani dan nelayan serta UMKM untuk menggerakkan ekonomi lokal dan daerah, fasilitasi bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, mendorong desa-desa untuk berinovasi dengan memunculkan 1 program prioritas 1 desa berbasis komoditas lokal yang dimiliki sehingga diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan.

Dan terakhir kami berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok sehingga tidak terjadi kenaikan atau inflasi. Dari beberapa upaya konkrit di atas saya meyakini Kabupaten Nunukan akan mengejar ketertinggalannya dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Peran dan kolaborasi stakeholder juga sangat menentukan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan.

Redaksi : Apa rencana Bapak untuk menumbuhkan UMKM dan menciptakan lapangan kerja di Nunukan

Melalui program prioritas saya dan pak Wakil Bupati, yakni mendorong perekonomian tumbuh di Kabupaten Nunukan salah satunya melalui fasilitasi bantuan ke UMKM, pemberian bantuan bibit ke petani dan nelayan untuk usaha produktif masyarakat.

Saya memastikan komoditas unggulan diserap pasar melalui Perusahaan Daerah. Langkah awal yakni bergerak pada komoditas rumput laut yang memang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Nunukan dan setelah itu komoditas unggulan lainnya akan saya kembangkan khususnya di sektor pertanian dan perkebunan hingga hilirisasi komoditas agar sejalan dengan prioritas nasional.

Kemudian menfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM menjadi dasar yang kuat untuk menumbuhkan usaha baru di Kabupaten Nunukan, dan di 17 program prioritas Saya dan Bapak Wakil Bupati juga memfokuskan 1 desa 1 program unggulan berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa, sehingga tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat didesa.

Redaksi : Apa harapan bapak kepada Masyarakat Kabupaten Nunukan?

Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, apa yang menjadi janji saya dalam visi-visi yang telah saya sampaikan, Insha Allah akan saya tunaikan. Namun, tentu saya juga membutuhkan masukan dan kritik—kritik yang membangun.

Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah daerah atau Bupati tidak boleh dikritik. Justru sebaliknya, kami menjadikan kritik sebagai sarana untuk membenahi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Masukan dari masyarakat itulah yang sangat kami butuhkan untuk mengetahui di mana kekurangan kami, sehingga bisa terus kami evaluasi dan perbaiki. Seperti itulah komitmen kami. ■



Gambar : Wikipedia

KABUPATEN NUNUKAN YANG **INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI**



H. Irwan Sabri, S.E
Bupati Kabupaten Nunukan

Hermanus, S.Sos
Wakil Bupati Kabupaten Nunukan

MISI RPJMD KABUPATEN NUNUKAN

MISI 1
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, DAN BERKARAKTER

MISI 2
PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

MISI 3
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS

MISI 4
PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA

MISI 5
MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI -NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD** PROVINSI **KABUPATEN NUNUKAN**

TAHAP 1 (2026)
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Stabilitas Wilayah Sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan

TAHAP 2 (2027)
Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar Dan Infrastruktur Ekonomi Untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

TAHAP 3 (2028)
Penguatan Sektor Strategis Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Berbasis Afirmasi Kewilayahan

TAHAP 4 (2029)
Penumbuhan Dan Penyebarluasan Inovasi Untuk Memantapkan Pembangunan Sosial, Kemandirian Ekonomi Dan Pemerataan Kesejahteraan

TAHAP 5 (2030)
Perwujudan Visi Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri



MEMBANGUN TANA TIDUNG DARI HATI : VISI BERKELANJUTAN UNTUK DAERAH TERMUDA DI KALTARA

Sebagai daerah termuda di Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung terus bergerak maju dengan semangat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan fisik, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dari listrik 24 jam, akses air bersih, hingga konektivitas digital yang merata. Wawancara ini menghadirkan refleksi, tantangan, dan visi jangka panjang Bupati Tana Tidung dalam mewujudkan daerah yang Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera, tanpa mengorbankan kearifan lokal maupun kelestarian lingkungan. Berikut dialog lengkapnya.

Redaksi : Menurut Bapak, apa saja keunggulan kompetitif utama Kabupaten Tana Tidung selama ini?

Saya pertama kali dilantik sebagai Bupati pada 26 Februari 2021. Saat itu, Kabupaten Tana Tidung masih banyak kekurangan. Salah satunya, dari 32 desa yang ada, belum semuanya menikmati aliran listrik 24 jam. Alhamdulillah, di periode pertama kepemimpinan saya, seluruh desa kini sudah teraliri listrik penuh. Ini tentu membawa dampak positif, anak-anak bisa belajar di malam hari, pelaku usaha kecil meningkatkan produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat secara umum menjadi lebih baik.

Begitu pula dengan akses air bersih. Dulu, banyak warga kesulitan mendapatkan air layak. Sekarang, jaringan PDAM sudah menjangkau semua desa. Tak kalah penting, dulu ada beberapa desa yang mengalami blank spot, tidak ada sinyal telekomunikasi sama sekali. Kini, di akhir periode pertama saya, semua desa sudah terjangkau jaringan. Masyarakat bisa berkomunikasi dengan lancar, bahkan memasarkan produk UMKM mereka lewat media sosial.

Salah satu momen paling berkesan adalah pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Usia kabupaten ini sekarang 18 tahun. Saat saya dilantik dulu, usianya baru 14 tahun. Infrastruktur jalan memang sudah cukup baik, tapi satu hal besar yang belum ada, kantor bupati dan kantor DPRD. Padahal, itu bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Masalahnya, kita tidak punya lahan untuk membangun pusat pemerintahan. Hampir 46% wilayah Tana Tidung masuk kawasan hutan produksi atau kawasan budidaya lainnya. Maka saya putuskan, kita harus punya pusat pemerintahan di atas lahan yang benar-benar menjadi aset Pemda bukan pinjam pakai, tapi 100% milik Kabupaten Tana Tidung.

Kami pun berjuang ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami mengajukan

permohonan adendum perubahan fungsi kawasan hutan. Alhamdulillah, di masa kepemimpinan Ibu Menteri Siti Nurbaya, permohonan itu dikabulkan. Izin perusahaan Adindo dievaluasi, dan 404 hektare lahannya dialihfungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) statusnya berubah menjadi aset Pemda Tana Tidung.

Di atas lahan itulah kini kita membangun pusat pemerintahan, kantor bupati, kantor DPRD, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Inilah pencapaian paling berkesan di periode pertama saya. Dan saya berharap, ini akan menjadi legasi yang bisa dikenang oleh masyarakat Tana Tidung untuk selamanya.

Redaksi : Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama memimpin dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?

Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur dasar serta masih rendahnya akses layanan publik di beberapa wilayah. Kondisi geografis Tana Tidung yang cukup luas dengan sebaran penduduk tidak merata membuat pembangunan sering menghadapi kendala biaya, waktu, dan keterjangkauan.

Untuk mengatasinya, kami mengedepankan strategi kolaboratif dengan pemerintah pusat, provinsi, dan juga sektor swasta. Misalnya, jika ada jalan kabupaten yang rusak parah sehingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan sulit dilakukan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata.

Untuk mengatasinya, kami mengupayakan pembangunan dan perbaikan jalan strategis melalui dukungan APBN maupun APBD, seperti perbaikan akses ke Desa Bebatu dan Desa Sambungan. Di sektor pendidikan, kami menggulirkan program beasiswa Tana Tidung Unggul, agar anak-anak berprestasi bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Sedangkan di sektor kesehatan, pembangunan RSUD Tipe C dengan sumber anggaran APBN menjadi terobosan penting agar layanan kesehatan lebih dekat dan berkualitas. Dengan langkah-langkah itu, pelan tapi pasti tantangan besar bisa diubah menjadi peluang kemajuan.





Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung

Redaksi : Menurut Bapak, apa saja keunggulan kompetitif utama Kabupaten Tana Tidung selama ini?

Kalau bicara soal keunggulan kompetitif, Kabupaten Tana Tidung tidak kalah dengan daerah lain. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa mulai dari perikanan, pertanian, hingga perkebunan. Letak geografis kita juga strategis di Kalimantan Utara, berada di jalur perdagangan dan berperan sebagai daerah penyangga bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

Selain itu, kita punya potensi ekowisata yang unik, seperti kawasan mangrove yang tadi sempat kita bahas, termasuk peluang dari *carbon credit*. Kita juga memiliki lahan basah dan kekayaan budaya lokal yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun investor.



> **"Tanah Tidung Melayani" menjadi prioritas utama dalam mewujudkan komitmen kami. Tidak boleh ada lagi desa yang menjadi *blank spot,* tidak boleh ada lagi desa yang terisolasi baik dari segi infrastruktur jalan, layanan dasar seperti listrik, maupun konektivitas telekomunikasi.**
>
> **Ibrahim Ali, S.P**
> **Bupati Tana Tidung**

Namun bagi saya, keunggulan terbesar bukan hanya pada sumber daya alam, melainkan pada sumber daya manusianya yang perlu terus ditingkatkan. Dengan semangat gotong royong, saya berharap masyarakat Tana Tidung memiliki etos kerja yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi.

Itu semua adalah modal sosial yang tak ternilai harganya dalam membangun daerah. Budaya kebersamaan, kekompakan, dan semangat gotong royong masyarakat Tana Tidung itu yang paling penting saat ini untuk kita eksplorasi, kita munculkan, dan kita jadikan fondasi agar Kabupaten Tana Tidung bisa bersaing di masa depan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Redaksi : Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten muda di Kalimantan Utara. Apa arah pembangunan jangka panjang yang menjadi prioritas utama Bapak?

Jadi, kalau berbicara tentang jangka panjang, kita harus memahami bahwa Kabupaten Tanah Tidung merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, prioritas jangka panjang kami adalah membangun fondasi pembangunan yang kokoh. Ada tiga pilar utama yang menjadi penopang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, pembangunan infrastruktur dasar; kedua, penguatan ekonomi lokal; dan ketiga, peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, setiap keluarga dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai, dan setiap desa terhubung melalui jaringan jalan, listrik, serta internet. Semua ini merupakan terjemahan nyata dari visi kami menjadikan Kabupaten Tanah Tidung sebagai daerah yang berdaya saing, adil, dan sejahtera.

Namun demikian, dalam seluruh proses pembangunan tersebut, kami tetap menjaga kearifan lokal dan melestarikan lingkungan sebagai prioritas utama. Pembangunan jangka panjang bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga membangun masyarakat yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung semua itu, tentunya kami juga membutuhkan konektivitas yang mumpuni baik dalam hal transportasi maupun digital sebagai tulang punggung infrastruktur dasar yang andal.

Redaksi : Bagaimana strategi Bapak dalam mempercepat konektivitas antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan?

Kami memiliki tiga strategi utama. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk memastikan arus barang dan mobilitas masyarakat berjalan lancar. Salah satu prioritas utama kami adalah pembangunan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Bebatu, yang bertujuan menekan harga kebutuhan pokok, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya.

Pelabuhan Bebatu merupakan contoh nyata upaya kami memperkuat simpul logistik di Kabupaten Tanah Tidung. Akses dari Pelabuhan Bebatu akan langsung tembus ke pusat pemerintahan kabupaten, dan selanjutnya terhubung melalui jalur darat ke Kabupaten Malinau. Jarak tempuhnya jauh lebih efisien, jika melalui sungai, perjalanan dari Pelabuhan Kelapis ke Malinau membutuhkan waktu sekitar 9 jam, sedangkan melalui Pelabuhan Bebatu hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai Kabupaten Malinau.

Inilah yang kami harapkan dapat membuka dan memperlancar simpul logistik, memperkuat perekonomian lokal, serta menekan harga kebutuhan pokok, bahan konstruksi, dan komoditas penting lainnya.

Strategi kedua adalah memperluas akses digital melalui lima program unggulan kami, salah satunya "Tanah Tidung Melayani" dan "Desa Cermat". Melalui program ini, desa-desa diharapkan dapat terhubung dengan dunia luar, membuka peluang usaha baru, serta mempercepat pelayanan publik. "Tanah Tidung Melayani" menjadi prioritas utama



dalam mewujudkan komitmen kami, tidak boleh ada lagi desa yang menjadi *blank spot,* tidak boleh ada lagi desa yang terisolasi baik dari segi infrastruktur jalan, layanan dasar seperti listrik, maupun konektivitas telekomunikasi.

Strategi ketiga adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kecamatan. Tujuannya agar pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga menciptakan sinergi di seluruh wilayah. Dengan begitu, desa-desa turut merasakan manfaat nyata dari pembangunan, dan pemerataan pembangunan bukan sekadar jargon, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah konkret.

Ketiga strategi ini menjadi pendorong utama pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung. Tentu saja, pelaksanaannya tidak terlepas dari komitmen kami terhadap perlindungan hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan.

Redaksi : Tana Tidung memiliki potensi besar di sektor kehutanan dan tambang. Bagaimana Bapak memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan?

Bagi kami, pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat adat maupun lingkungan. Oleh karena itu, setiap investasi di sektor kehutanan maupun pertambangan harus tunduk pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kami selalu menekankan tiga hal utama, yang pertama, kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat. Kedua, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan ketiga, penerapan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan.



Selain itu, kami juga mendorong perusahaan untuk menyusun program tanggung jawab sosial yang nyata bukan sekadar formalitas. Program tersebut harus menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Saya yakin, potensi alam dapat dikelola secara bijak sehingga memberikan manfaat ekonomi hari ini tanpa mengorbankan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi saya, keseimbangan antara pemanfaatan (eksploitasi) dan pelestarian (konservasi) adalah kunci utama untuk menjaga masa depan Kabupaten Tanah Tidung.

Redaksi : Bolehkah kami meminta Bapak untuk berbagi nilai-nilai atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang teguh hingga saat ini?

Ya, pertama kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Artinya, setiap amanah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, diniatkan dengan baik, dan diselesaikan hingga benar-benar memberikan manfaat.

Selain itu, saya juga selalu berpegang pada kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah dari Allah SWT dan amanah dari masyarakat. Dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di akhirat kelak, di hadapan Allah SWT.

Itulah yang menjadi kata kunci bagi saya, apa pun yang kita lakukan sebagai pemimpin, kelak akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.


Gambar : Wikipedia

Redaksi : Kami ingin tahu, sebagai seorang pemimpin seperti Bapak, apakah ada sosok inspiratif yang Bapak jadikan panutan dalam menjalankan kepemimpinan?

Kalau saya ditanya siapa pemimpin yang paling menginspirasi saya, tentu saya akan mengarah pada para tokoh yang berada di balik lahirnya Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten ini tidak terbentuk hanya untuk memenuhi syarat pendirian Provinsi Kalimantan Utara, melainkan melalui perjuangan panjang para senior dan pendahulu kita khususnya para tokoh presidium.

Mereka membangun Kabupaten Tanah Tidung dengan semangat luar biasa. Bahkan, saat akan menghadapi sidang di DPR RI, mereka harus bergotong royong mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya demi mewujudkan cita-cita bersama.

Salah satu sosok yang sangat menginspirasi saya adalah Bupati terdahulu, Almarhum Haji Undunsyah. Beliau mengajarkan saya tentang pentingnya kolaborasi dan bagaimana kita harus terus berjuang demi mencapai satu tujuan bersama, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung.

Inspirasi itulah yang terus mendorong saya untuk bersinergi, membangun secara adil, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga. Beban itu untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu masih saya rasakan hingga hari ini. Saya bertekad menjadikan Kabupaten Tanah Tidung sebagai daerah terbaik di Provinsi Kalimantan Utara.

Redaksi : Apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan mimpi bersama selama lima tahun ke depan?

Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung: mari kita bangun daerah ini dengan semangat kebersamaan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat pun membutuhkan pemerintah yang hadir, responsif, dan melayani.



Gambar : DeticKPT

Mimpi kita bersama adalah mewujudkan Tanah Tidung yang berdaya saing, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, mari kita jaga persatuan, kembangkan kreativitas, dan manfaatkan setiap potensi yang ada dengan bijak.

Saya yakin, jika kita bekerja sama dengan hati yang tulus, lima tahun ke depan akan menjadi momentum kebangkitan Tanah Tidung sebuah periode yang membanggakan bagi kita semua. ■

"TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA"



Ibrahim Ali, S.P
Bupati Kabupaten Tana Tidung

Sabri, S.Pd
Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung

MISI RPJMD KABUPATEN TANA TIDUNG

MISI 1
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI 2
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

MISI 3
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN MENDORONG KEMANDIRIAN DESA

MISI 4
MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MISI 5
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN **RPJMD KABUPATEN TANA TIDUNG**

TAHAP 1 (2026)
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar

TAHAP 2 (2027)
Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah

TAHAP 3 (2028)
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau

TAHAP 4 (2029)
Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan

TAHAP 5 (2030)
Perwujudan Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera

KEMISKINAN DI KALIMANTAN UTARA: TANTANGAN BERSAMA MENUJU KALIMANTAN UTARA YANG SEJAHTERA, MANDIRI,DAN BERKEADILAN

Apa yang terlintas di pikiran kita mengenai kemiskinan? Iya, kemiskinan adalah masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tapi tahukah kamu bahwa ada dua konsep kemiskinan yaitu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, ini adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya melibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ekstrem adalah bentuk kemiskinan yang paling parah, dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal dan pakaian.

Nah, kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pembangunan di Kalimantan Utara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan di Kalimantan Utara menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada 2020, kemiskinan di Kaltara tercatat 6,8 persen. Angka itu terus menurun menjadi 6,32 persen pada 2024. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *cost of basic needs.*

Garis Kemiskinan diperkotaan Maret 2025 sekitar 921.520 lebih besar dibandingkan didaerah pedesaan, sebesar 829.827, hal ini jelas mengakibatkan kesenjangan karena kebutuhan hidup di perkotaan lebih mahal dibandingkan pedesaan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kalimantan Utara, setelah dilakukan analisis mengenai situasi kemiskinan di Kalimantan Utara beberapa yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa bidang diantaranya adalah bidang infrastruktur dasar dan perumahan pemukiman tantangan utamanya ialah belum meratanya akses infrastruktur dasar bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dipedesaan. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah listrik, akses air minum, sanitasi, hunian dan jalan.

Kita beralih ke bidang sosial yang meliputi perlindungan sosial ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Apabila akses layanan kebutuhan dan perlindungan sosial tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan sosial yang salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Selanjutnya bidang kesehatan, seperti yang kita tahu kesehatan dan kemiskinan sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Kesehatan yang buruk



> **“Apabila akses layanan kebutuhan dan perlindungan sosial tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan sosial yang salah satunya adalah masalah kemiskinan.**

dapat menyebabkan kemiskinan, karena penyakit dan perawatan medis tentulah membutuhkan biaya maha sertal dapat mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebaliknya, kemiskinan juga dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, bisa jadi karena keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan akses, kondisi hidup yang tidak layak hingga menyebabkan berbagai penyakit dan gizi buruk.

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laut sehingga mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Permasalahannya adalah rendahnya hasil dari perikanan budidaya, terutama di daerah pesisir.

Masyarakat yang bergantung pada tambak udang dan ikan masih menghadapi banyak kendala, seperti susahnya mendapatkan bibit dan pakan, serta lahan tambak yang statusnya belum jelas karena berada di Kawasan hutan. Akibatnya,produksi tetap rendah dan penghasilan tidak meningkat, padahal sebenarnya komoditas seperti udang punya nilai jual tinggi di pasar luar negeri.

Nah, jika kita melihat dari bidang pertanian Kalimantan utara memililiki lahan pertanian yang cukup besar, karena ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan Perkebunan. Kendati demikian, hasil pertanian terutama padi belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sendiri.

Sampai saat ini Provinsi Kalimantan Utara belum mampu swasembada beras dan masih harus mendatangkan berasal dari luar wilayah terutama dari pulau jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani belum mampu sepenuhnya bisa menikmati hasil secara optimal dari sumber daya yang ada, sehingga pendapatan mereka masih terbatas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan belum meningkat secara merata.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Utara secara umum membaik. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja miskin. Artinya, meskipun mereka bekerja, penghasilannya masih rendah. Selain itu, pendidikan tenaga kerja masih didominasi lulusan SD ke bawah (29,79%),



Badan Pusat Statistik mencatat, kemiskinan di Kalimantan Utara menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir.

menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan dan pendidikan agar produktivitas bisa naik.

Pekerja informal masih cukup tinggi (50,41%), dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan belum optimal (masing-masing baru sekitar 59% dan 62%). Ini berarti perlindungan sosial bagi pekerja masih terbatas. Pengangguran juga paling banyak terjadi pada kelompok usia muda 20–24 tahun, yang menandakan masih terbatasnya lapangan kerja untuk generasi muda.

Pada bidang pendidikan, capaian rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sudah cukup baik dan bahkan di atas angka nasional, namun peningkatannya masih berjalan lambat dan belum merata di semua kabupaten/kota.





Masih banyak anak usia sekolah, terutama di daerah seperti Nunukan dan Tana Tidung yang belum bisa mengakses pendidikan dengan baik. Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kalimantan Utara tergolong tinggi, terutama pada kelompok usia 16-18 tahun.

Banyak di antara mereka berasal dari keluarga miskin dan lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah. Peningkatan akses, pemerataan kualitas pendidikan dan dukungan bagi keluarga miskin menjadi kunci untuk menurunkan angka anak tidak sekolah dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan di Kalimantan Utara.





Gambar : YKAN

Jika kita merujuk pada kondisi kemiskinan Kalimantan utara sejak tahun 2020-2024 kemiskinan lebih banyak berada di pedesaan. Desa punya peran penting karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa masih memerlukan perhatian khusus baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakatnya. Untuk itu, penguatan peran desa melalui program pemberdayaan dan peningkatan indeks desa menjadi kunci agar desa bisa lebih mandiri.

Dengan melihat berbagai tantangan tersebut, jelas bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara tidak bisa dilakukan secara parsial, diperlukan kerjasama atau kemitraan multipihak yang terarah, terintegrasi dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta mitra pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta optimalisasi potensi sumber daya alam harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur desa.

Kalau semua bergerak bersama, pelan – pelan kemiskinan bisa kurangi, dan kesejahteraan masyarakat bisa benar – benar dirasakan sampai ke pelosok desa. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud. (CTY)

Sinergi Wilayah Perbatasan dan Peran Strategis Kalimantan Utara dalam Mendukung IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membuka babak baru dalam sejarah pembangunan nasional. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Kota Dunia Untuk Semua menjadi tema pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara. IKN bukan sekadar proyek fisik pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan dan transformasi Indonesia menuju negara maju. IKN dalam konteks ini, provinsi-provinsi di Kalimantan memegang peranan penting, termasuk Kalimantan Utara, yang meskipun secara geografis tidak berbatasan langsung dengan wilayah IKN, memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan negara.

Sinergi antara pengembangan IKN dan wilayah perbatasan seperti Kaltara menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi dan keamanan di kawasan perbatasan. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia dengan karakteristik wilayah yang unik. Berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak), Kaltara memiliki potensi besar sebagai gerbang ekonomi dan diplomasi di kawasan utara Kalimantan. Wilayah ini juga kaya akan sumber daya alam seperti energi (PLTA, batubara, dan gas), kehutanan, dan perikanan.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tema pengembangan wilayah Kalimantan Utara diarahkan untuk menjadi Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan terbarukan serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan, Kaltara memiliki posisi geopolitik yang penting untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Dengan meningkatnya peran Kalimantan sebagai pusat gravitasi pembangunan nasional seiring hadirnya IKN, peran Kalimantan Utara semakin relevan dan strategis.



Gambar : Humas Otorita IKN

Sinergi Wilayah Perbatasan: Kunci Mendukung IKN

Dalam rangka mendukung pembangunan dan keberlanjutan IKN, sinergi antar wilayah di Kalimantan menjadi keniscayaan. Kalimantan Utara dapat memainkan peran sebagai:

Pertama, Penyedia Energi dan Sumber Daya. PLTA Kayan di Kaltara diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Asia Tenggara. Energi bersih dari Kaltara dapat menjadi pasokan utama untuk kebutuhan listrik ramah lingkungan di IKN, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kedua, Pintu Gerbang Perdagangan dan Logistik. Lokasi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dapat dioptimalkan sebagai simpul logistik dan perdagangan internasional. Dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, arus barang dan jasa ke dan dari IKN bisa dipercepat. Pengembangan KIPI juga diproyekskan dapat meningkatkan investasi Kawasan, mengembangkan kemitraan usaha dan rantai pasok.

Ketiga, Zona Penyangga Ketahanan Pangan dan Air. Pengembangan komoditas unggulan terutama dari sektor perikanan dan kelautan, Potensi lahan pertanian dan sumber daya air di Kaltara memungkinkan provinsi ini berperan sebagai penyokong kebutuhan pangan dan air bersih untuk wilayah IKN dan sekitarnya.

Terakhir, Benteng Pertahanan dan Keamanan Negara. Sebagai wilayah perbatasan, Kaltara berperan vital dalam pengawasan wilayah utara Indonesia, terutama dalam mendukung sistem keamanan terintegrasi seiring meningkatnya aktivitas strategis di wilayah Kalimantan. Salah satu strateginya adaah Pengembangan Kawasan Perbatasan melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, Tau Lumbis di Nunukan dan Long Nawang Di Malinau serta pengembangan Kecamatan Perbatasan Prioritas di Nunukan.

Untuk memastikan sinergi pembangunan berjalan secara optimal, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terpadu dan komprehensif.

- Integrasi Perencanaan Pusat dan Daerah, agar program pembangunan Kaltara sinkron dengan visi IKN.
- Peningkatan Konektivitas Infrastruktur, seperti jalan penghubung, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi.
- Penguatan peran Kerjasama regional Kalimantan melalui Forum Koordinasi Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)
- Penguatan Kerjasama antar negara yang telah terbangun melalui forum SOSEK MALINDO (Forum Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia dan Malaysia) dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philippines East ASEAN Growth Area)
- Penguatan SDM dan Lembaga Pemerintahan, khususnya di kawasan perbatasan.
- Kemitraan Multi-Pihak, termasuk investasi swasta, kolaborasi BUMN, dan peran serta masyarakat lokal.

Kalimantan Utara bukan hanya wilayah yang berada di pinggiran negara, tetapi juga garda terdepan dalam memperkuat daya saing nasional. Dengan membangun sinergi yang kuat antara Kaltara dan IKN, Indonesia dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi ke masa depan.

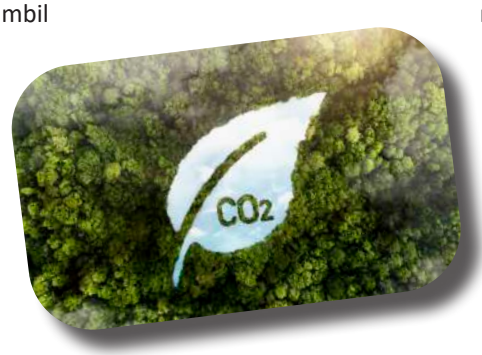
Peran strategis Kalimantan Utara dalam mendukung IKN harus terus diperkuat, bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan penguatan identitas kawasan perbatasan sebagai motor kemajuan Indonesia di era baru. (RSL)



Gambar : Ilustrasi PLTA (CNN)

Membangun Masa Depan Kalimantan Utara melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Pembangunan ekonomi sering kali berdampak pada lingkungan, seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca (GRK), dan pencemaran. Namun, Kalimantan Utara mengambil langkah berbeda yaitu dengan berkomitmen menuju masa depan yang ramah lingkungan melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.



Pembangunan Rendah Karbon bukan sekadar tren, melainkan pendekatan strategis yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah ini, Kalimantan Utara dapat mengurangi risiko bencana iklim seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan. Berbagai langkah dan inisiatif telah dipersiapkan Kalimantan Utara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon. Upaya ini dimulai dari sektor kehutanan dan lahan, di mana pemerintah mendorong kebijakan moratorium terhadap pembukaan hutan baru serta melakukan rehabilitasi pada kawasan hutan yang kritis. Penanaman kembali kawasan yang rusak menjadi salah satu prioritas utama sebagai bentuk pemulihan ekosistem dan penyerapan karbon.

Selanjutnya, di bidang pertanian, fokus diarahkan pada perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus mengurangi konversi lahan. Penggunaan pupuk organik dan efisiensi air juga diperkenalkan untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan minim emisi.

Transformasi juga terjadi di sektor energi dan transportasi. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro (PLTMH) sebagai alternatif energi yang lebih bersih. Bersamaan dengan itu, Kalimantan Utara tengah mempersiapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan melalui pengembangan kendaraan listrik dan *Bus Rapid Transit*. Pada wilayah pesisir, perhatian difokuskan pada rehabilitasi hutan mangrove dan tata kelola tambak yang berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian ekosistem, kawasan pesisir memiliki potensi besar dalam menyimpan cadangan karbon biru yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim.

Sektor pengelolaan limbah pun tidak luput dari perhatian. Masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah, memanfaatkan keberadaan bank sampah, serta menerapkan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah juga mulai merancang pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi *(Waste to Energy)* sebagai solusi jangka panjang.

Tak kalah penting, sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) juga mendapat perhatian dalam perencanaan penurunan emisi. Kegiatan industri seperti produksi semen, baja, dan penggunaan bahan pendingin berpotensi menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah signifikan. Di Kalimantan Utara, beberapa langkah konkret yang akan dilaksanakan antara lain adalah

mendorong penggunaan bahan bangunan rendah emisi di sektor konstruksi, serta mendampingi pelaku industri kecil dan menengah agar beralih ke teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah juga merencanakan kampanye pengurangan penggunaan bahan pendingin konvensional seperti *Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hidrofluorokarbon (HFC),* serta mendorong konversi ke refrigeran ramah iklim di sektor perdagangan dan perhotelan yang berkembang pesat. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang usaha hijau di tingkat lokal.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan yang mendukung, seperti memperluas ruang terbuka hijau, menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan menyediakan fasilitas energi terbarukan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi dan air dalam kehidupan sehari-hari, memilah dan mengelola sampah dari rumah, serta memilih produk-produk lokal yang ramah lingkungan. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan secara kolektif dapat memberikan dampak besar dalam menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Utara.

Melalui upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, Kalimantan Utara memiliki tujuan utama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 38% pada tahun 2029. Di saat yang sama, provinsi ini juga berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan stabil bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana iklim yang semakin sering terjadi.

Untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai harapan, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Dengan cara ini, setiap program dapat terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Namun, pencapaian target tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ini merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga bumi dan masa depan Kalimantan Utara. Dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya, kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi atau kebijakan dari atas, melainkan juga memerlukan kesadaran dan aksi dari bawah; dari rumah tangga, sekolah, komunitas, hingga pelaku usaha.

Kita perlu membangun budaya baru yang lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya hingga memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan lingkungan yang tidak hanya tangguh menghadapi perubahan iklim, tetapi juga sejahtera karena mampu menjaga sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Mari kita jadikan Kalimantan Utara sebagai contoh daerah yang berhasil menggabungkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, kita bisa mewujudkan Kaltara yang Maju, Rendah Emisi, dan Tahan Iklim. (AA)



Konektivitas Digital di Kalimantan Utara: Antara Tantangan Infrastruktur dan Upaya Pemerintah Membangun Wilayah Perbatasan

Kalimantan Utara, sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki peran strategis dalam penguatan kedaulatan negara serta pembangunan wilayah perbatasan. Namun, upaya tersebut masih terganjal oleh keterbatasan infrastruktur komunikasi dan akses internet yang belum merata.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36 persen dari total populasi. Angka ini meningkat secara signifikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana tingkat kemiskinan rata-rata berkisar antara 17 hingga 23 persen. Bank Dunia dalam laporan *"Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class" (2020)* mencatat bahwa pertumbuhan kelas menengah di wilayah perkotaan berjalan cukup pesat, tetapi tidak demikian halnya dengan daerah 3T.

Faktor utama penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini adalah rendahnya akses terhadap pendidikan bermutu, lapangan kerja formal, dan infrastruktur digital. Minimnya konektivitas menjadi penghambat besar bagi potensi akselerasi ekonomi di Kaltara, khususnya dalam digitalisasi UMKM dan pemanfaatan informasi global.

Di wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor, layanan komunikasi dan jaringan internet relatif memadai dengan tersedianya sinyal 4G. Namun, kondisi ini tidak berlaku di wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Krayan (Nunukan), sebagian Malinau, dan beberapa daerah di Tana Tidung.

Beberapa wilayah bahkan masih sepenuhnya blankspot, sehingga masyarakat bergantung pada radio SSB atau perangkat satelit untuk berkomunikasi. Kondisi ini berdampak langsung pada akses pendidikan daring, pelayanan publik, serta peluang pengembangan ekonomi digital.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kaltara menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah yang didominasi pegunungan, hutan lebat, dan minimnya akses jalan membuat biaya pembangunan menara BTS sangat tinggi dan teknisnya sulit.

Selain itu, jumlah menara BTS dan jaringan fiber optik di daerah pedalaman masih sangat terbatas. Beberapa desa bahkan belum terjangkau jaringan 2G, apalagi 4G. Operator swasta cenderung enggan berinvestasi di wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi, sehingga ketimpangan digital semakin nyata.

Sebagai alternatif, beberapa wilayah terpencil hanya bisa mengakses internet melalui layanan *VSAT (Very Small Aperture Terminal).* Sayangnya, layanan ini memiliki biaya operasional tinggi dan kecepatan internet yang rendah, sehingga kurang efektif untuk mendukung aktivitas pendidikan,

kesehatan, maupun ekonomi masyarakat.

Langkah Strategis untuk Memperkuat Konektivitas
Pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjalankan program pembangunan BTS 4G dan penyediaan internet desa di wilayah 3T. Langkah ini perlu dipercepat dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak wilayah di Kaltara.

Selain itu, teknologi internet satelit seperti Starlink mulai dianggap sebagai solusi alternatif. Teknologi ini dinilai cocok untuk wilayah yang sulit dijangkau karena tidak bergantung pada kabel atau BTS darat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi subsidi pemasangan perangkat Starlink untuk sekolah, puskesmas, dan masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah menyediakan akses internet ke sejumlah sekolah SMA/SMK sederajat, UPT, dan jaringan intra-pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses digital secara bertahap dan memberdayakan masyarakat dalam mempromosikan potensi lokal mereka sendiri.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan lembaga riset menjadi penting untuk melakukan pemetaan wilayah blankspot dan

No.	Lokasi	Kabupaten
1.	SMAN 1 Peso	Bulungan
2.	Desa Tias	Bulungan
3.	SMAN Tanjung Palas Barat	Bulungan
4.	SMAN 2 Tana Tidung	Tana Tidung
5.	SMAN 6 Sungai Boh	Malinau
6.	SMAN 16 Tanjung Nanga	Malinau
7.	Kantor Pemerintahan Sungai Boh	Malinau
8.	KPH Malinau	Malinau
9.	SMAN 13 Long Sule	Malinau
10.	SMAN 7 Pujungan	Malinau
11.	SMAN 10 Bahau Hulu	Malinau
12.	SMKN 1 Krayan	Nunukan
13.	SMKN 1 Sei Menggaris	Nunukan

Sumber : DKISP Kaltara



menyusun roadmap penguatan komunikasi digital. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan literasi digital akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis digital.

Pembangunan konektivitas digital di Kalimantan Utara bukan hanya soal memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, masalah komunikasi di Kaltara diharapkan tidak lagi menjadi penghambat, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membangun wilayah perbatasan dari pinggiran.(AS)


Instalasi VSAT di Malinau





Konferensi Ekologis VI

Jakarta - Krisis iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan keberlanjutan bagi bangsa. Ancaman seperti rob, abrasi, kekeringan, dan gagal panen kini semakin nyata di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi darurat ini mengharuskan kita mengubah fokus. Kita tidak bisa hanya melakukan aksi mitigasi, tapi harus mencari solusi yang lebih mendalam dan struktural. Sudah waktunya kita bicara tentang pendanaan yang adil, regeneratif, dan membawa perubahan besar untuk menjaga ketahanan lingkungan dan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis (Konfernas) VI 2025. Konferensi ini mengusung tema sentral “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”. Tema ini menekankan perlunya segera meninggalkan cara berbisnis yang lama dan mencari ide baru untuk memobilisasi sumber daya bagi pembangunan hijau.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mendapat penghargaan nasional. Penghargaan ini diberikan pada Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI 2025 di Jakarta Pusat. Kaltara diakui sebagai Pemerintah Daerah Pelopor *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Menteri Dalam Negeri pada Selasa, 5 Agustus 2025.





Nasional Pendanaan 2025

Selain menerima penghargaan, Gubernur Zainal juga menjadi salah satu Narasumber dalam Talkshow Menata Paradigma Baru Tata Kelola Pendanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan Tema "Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Kalimantan Utara".

Konfernas VI 2025 dirancang sebagai forum strategis utama yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Forum ini secara spesifik bertujuan untuk memperluas cakupan skema pendanaan hijau di tingkat daerah, memastikan inovasi seperti *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* dapat diterapkan secara merata. Hal ini krusial untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain itu, konferensi ini berupaya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan multi pihak dalam agenda iklim, menciptakan sinergi yang kokoh antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Konfernas VI juga akan menegaskan kembali peran masyarakat sipil sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola anggaran lingkungan, menjamin transparansi, dan memastikan keadilan ekologis. (NF)

Staf Ahli Menkopolhukam Tinjau Implementasi Program Prioritas di Beranda Depan NKRI



> *Kaltara dengan segala potensi dan tantangannya, siap menjadi pilot project dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional.*
>
> **Ingkong Ala**

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat kunjungan kerja Tim Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (9/7). Rombongan yang terdiri dari perwira tinggi TNI, Polri, dan Analis Kebijakan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., di Kantor Gubernur.

Kunjungan kerja selama empat hari ini bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung *(on the spot)* guna mengoptimalkan implementasi program-program prioritas nasional di wilayah strategis Kaltara, khususnya dari perspektif politik

dan keamanan.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran konkret dan komprehensif di lapangan. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi kebijakan strategis di empat bidang utama kepada pimpinan Kemenkopolhukam, yaitu: Ideologi dan Konstitusi: Memperkokoh nilai Pancasila dan konstitusionalitas di wilayah perbatasan yang rentan pengaruh asing. Ketahanan Nasional: Menilai ketahanan wilayah, sosial, dan ekonomi, termasuk dampak program seperti Makanan Bergizi (MBG) dalam membangun loyalitas warga di perbatasan.

Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman: Mengidentifikasi masalah dan potensi di kawasan perbatasan darat dan laut untuk menjaga kedaulatan negara. Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital: Memperkuat sinergi antar instansi dan mendorong digitalisasi layanan publik untuk tata kelola yang efektif.

Tim yang bertandang ke Kaltara dipimpin oleh empat pejabat utama. Keempat pimpinan delegasi tersebut adalah Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan, S.H., yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; Marsda TNI Oka Prawira, M.Si. (Han), Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; Irjen Pol. Dr. Tony Hermawan R., S.I.K., M.Sos., M.M., Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital; serta Laksma TNI Rudi Hariyanto, S.E., M.Tr.Opsla, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman.

Mereka didukung oleh sejumlah analis dan staf pendukung, menandakan keseriusan pemerintah pusat dalam mengevaluasi pembangunan di daerah terdepan ini. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ingkong Ala menyambut hangat kedatangan rombongan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam mendukung penuh seluruh program prioritas nasional, yang telah diselaraskan dengan 8 Misi RPJMD Kaltara dan Asta Cita Pemerintah Pusat.

"Kaltara dengan segala potensi dan tantangannya, siap menjadi *pilot project* dalam mengimplementasikan program-program strategis



nasional. Kehadiran Bapak-Ibu Staf Ahli hari ini merupakan bentuk nyata perhatian pusat terhadap pembangunan di Beranda Depan NKRI," ujar Ingkong Ala.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan berharap kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang afirmatif bagi Kaltara. "Kami berharap ada kebijakan yang lebih lincah dan luwes, seperti *affirmative policy* atau desentralisasi asimetris, serta dukungan anggaran yang memadai untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama puluhan tahun di wilayah perbatasan," tambahnya.

Setelah rapat koordinasi dengan Pemprov, agenda kunjungan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dengan seluruh pimpinan instansi vertikal di Kaltara, termasuk Kapolda, Danrem, Danlantamal, Danlanud, dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta kunjungan lapangan ke lokasi strategis seperti Pelabuhan Tengkayu.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga menjadi pemantik akselerasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Utara, terutama diwilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI. (ROM)

Dari SMA Garuda untuk Generasi Unggul dan Kalimantara Utara Maju



Tanjung Selor - Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan lampu hijau untuk membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Garuda, menyusul kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Stella Christie, Ph.D., pada Jumat (11/7). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengembangkan pusat pendidikan unggulan di daerah strategis, khususnya wilayah perbatasan yang memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing nasional.

Berdasarkan hasil pertemuan, Kaltara menjadi satu dari lima daerah prioritas untuk pembangunan SMA Unggulan Garuda di Indonesia, dari total 20 sekolah yang akan dibangun secara nasional. Program gagasan Presiden RI ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Kaltara.

Gubernur Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan SMA Unggulan Garuda sebagai langkah nyata investasi sumber daya manusia. “Ini adalah investasi penting bagi generasi muda Kaltara ke depan, agar anak-anak daerah dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujarnya dalam pertemuan bersama Wakil Menteri.

Sekolah yang akan menerapkan sistem *boarding school* ini direncanakan memiliki dua kawasan utama. Fasilitas pembelajaran seperti ruang belajar, asrama siswa dan guru, serta laboratorium riset mini akan menempati lahan seluas 5 hektare di kawasan belakang Kantor DPRD Kaltara di Gunung Seriang.

Sementara itu, untuk mendukung aktivitas olahraga dan pengembangan bakat siswa, akan dibangun *Sport Center* di atas lahan seluas 15 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), yang juga akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sebagai perencana di Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Kaltara dirancang untuk menjadi model integrasi antara pendidikan akademik, riset, dan pengembangan karakter.

Pusat pembelajaran akan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan sistem digital terpadu, sementara *sport center* akan difungsikan tidak hanya sebagai sarana olahraga pelajar, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat. Dengan pendekatan ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Dalam kunjungannya, Prof. Stella Christie menyampaikan bahwa sekolah ini akan menerima siswa secara nasional, dengan kuota khusus sebesar 20 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Utara. Kebijakan serupa juga diterapkan dalam rekrutmen tenaga pendidik, yang akan dipilih secara nasional guna menjamin keberagaman dan mutu pengajaran.

Dukungan politik dari DPRD Kaltara turut menjadi poin penting yang dibahas, khususnya terkait proses penyerahan aset lahan kepada kementerian.



Dengan percepatan administrasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat, sehingga sekolah dapat beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Kehadiran SMA Unggulan Garuda di Kaltara diperkirakan akan membawa dampak positif yang luas. Dari sisi pendidikan, sekolah ini menjadi simbol pemerataan kualitas pendidikan unggulan di wilayah perbatasan. Secara ekonomi, pembangunan fasilitas pendidikan berskala nasional akan menggerakkan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan, menciptakan peluang usaha, dan membuka lapangan kerja baru, terutama penyerapan lapangan kerja untuk sarjana-sarjana terampil di bidang pendidikan.

Lebih jauh, kehadiran SMA Unggulan Garuda akan memperkuat posisi Kaltara sebagai wilayah strategis yang tidak hanya menjadi beranda depan NKRI, tetapi juga beranda pengembangan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia bagian utara. Dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen daerah, diharapkan sekolah ini menjadi tonggak penting bagi lahirnya generasi muda Kaltara yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. (ROM)



TPKJM Kaltara Perkuat Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas



Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Integrasi Layanan Kesehatan Jiwa Komunitas se-Kaltara. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (2–3/10/2025), di Ruang Pertemuan RSUD dr. Jusuf SK Tarakan ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah TPKJM Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Dt. Iqro Ramadhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu kesehatan jiwa di daerah. “Kesehatan jiwa bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan tanggung jawab kita semua. Melalui TPKJM ini, kita ingin membangun sinergi yang kuat antara dinas kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, aparat penegak hukum, organisasi profesi, hingga tokoh masyarakat dan agama untuk bersama-sama membangun sistem layanan yang komprehensif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti posisi Kaltara sebagai wilayah beranda depan NKRI. “Sebagai provinsi perbatasan, tantangan kesehatan jiwa di Kaltara memiliki dimensi yang kompleks. Mulai dari keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, stigma yang masih tinggi, hingga kerentanan sosial lainnya. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas melalui TPKJM dari tingkat provinsi hingga kecamatan menjadi sangat krusial,” tambahnya.

Pembentukan TPKJM sendiri diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM). Berdasarkan regulasi tersebut, TPKJM berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program kesehatan jiwa masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.

Tim ini tidak hanya berfungsi mengarahkan program teknis kesehatan jiwa, tetapi juga memastikan keterpaduan antara sektor kesehatan, sosial,

pendidikan, dan ketenagakerjaan agar penanganan masalah kejiwaan berlangsung secara menyeluruh. Tugas utama TPKJM mencakup penyusunan kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan advokasi dan edukasi publik untuk menurunkan stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan jiwa masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis untuk peningkatan mutu layanan di daerah. Bagi Kalimantan Utara, keberadaan TPKJM memiliki arti penting dalam memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas.

Ke depan, TPKJM Provinsi Kaltara akan memfokuskan langkah pada pembentukan tim di seluruh kabupaten dan kota agar koordinasi layanan berjalan seragam. Selain itu, tim provinsi tengah menyusun peta jalan kesehatan jiwa masyarakat jangka menengah yang memprioritaskan deteksi dini ODGJ, penguatan sistem rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi bagi penyintas gangguan jiwa.

Upaya integrasi program kesehatan jiwa ke dalam layanan primer juga menjadi perhatian utama, dengan mendorong puskesmas di seluruh wilayah agar mampu melakukan skrining, pendampingan, dan rujukan yang lebih cepat serta tepat sasaran. Dalam waktu dekat, TPKJM Provinsi Kaltara juga akan menjalin kerja sama dengan rumah sakit rujukan, lembaga sosial, dan dunia usaha guna memperkuat jejaring rehabilitasi serta pelatihan keterampilan bagi ODGJ yang telah pulih agar dapat kembali produktif di tengah masyarakat.



Layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat berdasarkan WHO



Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan perwakilan dari lima kabupaten/kota se-Kaltara ini juga diisi dengan sesi Psikoedukasi Masyarakat oleh pakar kesehatan jiwa, Dr. dr. Warih Andan Puspitosari, M.Sc., Sp.KJ(K), yang membahas berbagai mitos seputar ODGJ serta pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada inovasi layanan kesehatan jiwa komunitas yang dipandu oleh Siti Mulyani, S.Kep.Ns. Peserta diajak untuk menelaah praktik baik seperti program Gelimasjiwo–Simantap Sejagat dari Bantul, DIY, yang berhasil mengintegrasikan ODGJ kembali ke masyarakat dan dunia kerja, serta membahas strategi penerapannya di konteks Kaltara.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen lintas sektor untuk menghapus stigma, memperluas akses layanan, serta mewujudkan sistem kesehatan jiwa masyarakat yang inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Melalui kerja kolaboratif yang berkelanjutan, TPKJM Provinsi Kaltara diharapkan menjadi motor penggerak menuju Kaltara Sehat Jiwa dan Sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk pulih, tumbuh, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. (ROM)

Matangkan RPJMD 2025 – 2029
Lewat Evaluasi RANPERDA





Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara secara berturut-turut pada tanggal 12-14 Agustus 2025. Selain berkewajiban menyusun dokumen RPJMD Provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap Ranperda RPJMD kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan, Perda RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah kabupaten/kota melalui proses yang cukup panjang dalam penyusunan dokumen diantaranya Konsultasi Publik, Musrenbang, Reviu APIP hingga Persetujuan Bersama dengan DPRD.

Pada kegiatan evaluasi ini, Bappeda dan Litbang beserta Biro Hukum serta Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan masukan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan keselarasannya dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memastikan dukungan kabupaten/kota terhadap kebijakan nasional seperti diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 yang menyatakan salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan Program Strategis Nasional.

Dimana untuk periode kepemimpinan Prabowo-Gibran, Program Strategis Nasional meliputi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 Juta Rumah Jaminan Kesehatan Nasional, Makan Bergizi Gratis, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengendalian Inflasi, Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kemudahan perizinan di daerah.

Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas untuk menjadi pondasi kokoh pelaksanaan periode 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045 demi terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. (ENR)

Verifikasi Renstra PD 2025–2029, Untuk Perencanaan Lebih Terpadu



Tanjung Selor - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara menggelar verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20 hingga berakhir di 27 Agustus 2025, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah provinsi dengan program kerja masing-masing OPD.

Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen Renstra PD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, target RPJMD, serta kesiapan OPD dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang efektif, efisien, dan terukur untuk lima tahun ke depan. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, mulai dari dinas, badan, hingga biro dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD), diwajibkan mengikuti proses verifikasi ini.

Verifikasi ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi proses penting untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki peta jalan yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi besar Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur, maju, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Litbang melibatkan tenaga ahli dari berbagai lembaga mitra strategis, baik nasional maupun internasional, untuk memberikan masukan teknis. Beberapa di antaranya adalah *GGGI (Global Green Growth Institute), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), TAF (The Asia Foundation),* dan *SMART ID,* yang akan bertindak sebagai fasilitator atau narasumber dalam sesi verifikasi.

Selain itu, OPD seperti Bappeda Litbang, BKAD, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Organisasi turut dilibatkan sebagai pembahas untuk memastikan aspek keuangan, kelembagaan, dan tata kelola program terintegrasi dengan baik.

Dengan dilaksanakannya verifikasi Renstra ini, Bappeda Litbang berharap dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah, memperkuat akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung capaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (AS)

Evaluasi Daerah Jadi Kunci Lompatan Pelayanan Publik Kalimantan Utara



Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui pelaksanaan Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2025, pemerintah berupaya menegaskan arah transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menginventarisasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Proses penilaian dilakukan dengan meninjau tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil evaluasi selanjutnya akan disusun dalam bentuk dokumentasi dan narasi komprehensif sebagai bahan utama pelaporan Provinsi Kalimantan Utara dalam *Innovation Government Award (IGA)* Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan evaluasi ini memiliki arti strategis karena merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Daerah yang melaksanakan evaluasi inovasi secara eksternal akan memperoleh skor tertinggi dalam komponen penilaian IGA, karena dinilai memiliki sistem pengukuran dan pengendalian yang objektif serta kredibel terhadap kinerja inovasi.

Untuk memperoleh nilai kematangan inovasi yang tinggi, salah satu syaratnya adalah pelaksanaan evaluasi oleh lembaga independen melalui hasil laporan monitoring dan evaluasi (monev) eksternal yang berbasis pada kajian, penelitian, atau analisis mendalam. Evaluasi eksternal ini termasuk dalam parameter ketiga pada sistem penilaian inovasi daerah nasional.

Lebih dari sekadar kegiatan administratif, evaluasi inovasi daerah menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan penerapan inovasi di daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menilai sejauh mana inovasi yang dikembangkan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan efisiensi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Pelaksanaan evaluasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola inovasi daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.



Meski demikian, regulasi di tingkat daerah masih memerlukan aturan turunan dari Perda, karena sebagian besar masih mengacu pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penguatan regulasi turunan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pelaksanaan inovasi, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangannya.

Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi OPD di lima kabupaten/kota. Tim evaluator membawa 20 indikator penilaian IGA untuk dicocokkan dengan data dan praktik yang berjalan di lapangan. Sebanyak 50 inovasi daerah terpilih menjadi objek verifikasi, mencakup kategori inovasi pelayanan publik (64%), tata kelola pemerintahan (26%), serta inovasi lainnya (10%). Proporsi tersebut menunjukkan fokus besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat pelayanan publik sebagai inti dari inovasi daerah.

Hasil kajian dari Universitas Borneo Tarakan turut merekomendasikan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan OPD secara berkelanjutan agar inovasi yang telah tumbuh dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Rekomendasi ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan evaluasi inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap inovasi yang dijalankan oleh perangkat daerah benar-benar terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang terukur. Evaluasi menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kematangan inovasi, apakah telah diterapkan secara konsisten, dikelola dengan baik, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan birokrasi. Hasil dari proses ini diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi pengembangan inovasi daerah di Kalimantan Utara. (PIL)

Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025



Tanjung Selor - Dalam upaya mempercepat penurunan stunting di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025 di Aula Gedung Gabungan Dinas (30/7).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan bahwa penilaian kinerja merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara melaksanakan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, penilaian ini tidak sekadar evaluasi administratif, namun merupakan proses penting untuk memastikan komitmen daerah dalam memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif. “Penurunan stunting bukan hanya agenda tahunan, tetapi perjuangan berkelanjutan yang membutuhkan sinergi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa,” tegas Dr. Bustan.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan 8 aksi konvergensi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program yang menyentuh langsung keluarga sasaran, khususnya rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung kabupaten/kota melalui pembinaan, fasilitasi teknis, dan pemantauan berkala.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 30–31 Juli 2025, dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Penilaian dilakukan oleh tim panelis yang terdiri atas unsur Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan, DP3APPKB, Dinas PUPR-Perkim, Dinas Ketahanan Pangan, akademisi Universitas Kaltara, serta perguruan tinggi mitra lainnya.

Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting tahun 2024 di setiap daerah, dengan indikator yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Edisi Revisi Ketiga Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.



Dalam laporannya, Bertius menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kalimantan Utara menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan data SSGI dan e-PPGBM, angka prevalensi stunting Provinsi Kaltara turun dari 12,9 persen pada tahun 2023 menjadi 9,6 persen pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kalimantan Utara di bawah rata-rata nasional dan menunjukkan efektivitas program konvergensi yang dijalankan secara terpadu oleh lintas sektor.

Kabupaten Bulungan memaparkan hasil pelaksanaan intervensi dan inovasi daerah melalui program DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), MATADOR (Makanan Tambahan Daun Kelor), dan GENTONG MAS SANTUN, yang berfokus pada peningkatan gizi keluarga berisiko stunting dengan melibatkan perangkat daerah, TP PKK, dunia usaha, dan akademisi.

Kabupaten Nunukan menampilkan inovasi Mandre Madduro, kegiatan pemberian makanan bergizi berbahan ikan lokal hasil tangkapan nelayan, serta program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang memanfaatkan data untuk analisis penyebab stunting di tiap desa. Berdasarkan laporan TPPS Kabupaten Nunukan, prevalensi stunting turun dari 14,6 persen pada 2022 menjadi 10,9 persen di 2024.

Kota Tarakan melaporkan penurunan stunting yang konsisten dari 25,9 persen pada tahun 2021 menjadi 12,6 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kota Tarakan menerapkan program SIHAT PENTING (Sanitasi Sehat Pencegah Stunting) dan penguatan audit kasus stunting secara berkala dengan tindak lanjut lintas sektor.

Kabupaten Malinau menampilkan sejumlah inovasi daerah, antara lain MALNUTRISING (Malinau Utara Bersinergi Cegah Stunting), PATROLI (Pantau, Timbang, Ronda, Libatkan), dan Dapur Sehat Desa Lokus. Melalui program tersebut, angka stunting berhasil ditekan dari 18,2 persen pada tahun 2023 menjadi 10,8 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung melaporkan hasil positif melalui berbagai inovasi seperti SIPALING PENTING, SAFARI GIZI, PANORAMA, serta BUSAK PAUD yang fokus pada ketahanan pangan lokal, edukasi gizi, dan peningkatan kompetensi guru PAUD. Kabupaten ini mencatat penurunan angka stunting hingga 50 persen sepanjang 2024.

Selain penilaian terhadap pelaksanaan delapan aksi, tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menambahkan kategori Kecamatan Terinovatif untuk mendorong semangat dan kreativitas pemerintah kecamatan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

Pemenang penilaian akan memperoleh penghargaan berupa piala bergilir, trofi, piagam, dan uang pembinaan sebesar Rp40 juta untuk juara pertama tingkat kabupaten/kota, serta penghargaan uang pembinaan hingga Rp12,5 juta bagi kecamatan paling inovatif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap setiap kabupaten/kota memperoleh umpan balik konstruktif dalam meningkatkan konvergensi program penurunan stunting di daerah masing-masing. Evaluasi juga diharapkan menjadi wadah *peer learning* antar-daerah agar praktik baik dapat direplikasi di wilayah lain.

Kegiatan penilaian ini menegaskan bahwa penurunan stunting di Kalimantan Utara bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi merupakan gerakan bersama lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat dan unggul.(ROM)

Sinergi Tim PPED untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah





Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menunjukkan langkah progresifnya dalam memperkuat perekonomian daerah. Melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) yang digelar pada Selasa, 29 Agustus 2025, Pemerintah Provinsi bersama jajaran Forkopimda, instansi vertikal, dan perangkat daerah membahas langkah konkret mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah selaku ketua tim merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ serta amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Kaltara menjadi provinsi pertama di regional Kalimantan dalam membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/430/2025, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap arahan nasional dalam penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam rapat tersebut, berbagai pihak menyepakati sembilan langkah konkret sebagai strategi utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ.

Langkah-langkah tersebut meliputi mempercepat realisasi APBD, mempercepat realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN, mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, mengendalikan harga bahan pokok, mencegah ekspor dan impor ilegal.

Kemudian, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal dan menyederhanakan serta mempercepat perizinan berusaha."

"Langkah-langkah ini tidak hanya administratif, tetapi harus diikuti aksi nyata di lapangan. Kuncinya adalah data yang valid, kerja kolaboratif, dan pelaporan yang disiplin," tegas Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kaltara, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara dalam paparannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada Triwulan II 2025 mencapai 4,52 persen, masih di bawah rata-rata nasional, namun termasuk yang tertinggi di kawasan Kalimantan. Sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor perdagangan (1,15%), konstruksi (1,07%), dan industri pengolahan (0,94%).

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan bahan mentah, belum meratanya infrastruktur konektivitas antarwilayah, serta pemanfaatan ekonomi digital yang masih terbatas. Namun, arah penguatan ekonomi Kaltara kini mulai bergeser. Hilirisasi industri logam dan pangan, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan kualitas SDM menjadi fokus jangka panjang yang akan terus digarap.

Kehadiran berbagai instansi strategis seperti Bank Indonesia, BPS, Bea Cukai, BPOM, Kejati, Korem 092/Maharajalila, dan Polda Kaltara menunjukkan kuatnya sinergi antar-lembaga dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bea Cukai menegaskan dukungannya dalam pengawasan ekspor-impor agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional, sementara BPOM melaporkan pendampingan terhadap pelaku UMKM di bidang keamanan pangan. Dari sisi ketahanan pangan, Korem 092 menyampaikan keberhasilan program optimalisasi lahan dan rencana cetak sawah seluas 7.000 hektar yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja baru di wilayah Kaltara.

Sebagai tindak lanjut, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) perlu melakukan pelaporan rutin maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya melalui laman resmi kendaliekonomi.kemendagri.go.id. Laporan tersebut akan memuat perkembangan realisasi langkah konkret, kondisi eksisting ekonomi daerah, serta indikator capaian sektoral.

Bappeda dan Litbang sebagai sekretariat tim PPED telah menyiapkan template pelaporan terpadu dan ruang kerja digital bersama untuk memudahkan koordinasi antarperangkat daerah. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh data dan capaian ekonomi daerah terintegrasi dengan baik.

Melalui Rakor PPED ini, Kalimantan Utara kembali menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar "mengejar angka", tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap potensi daerah dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kaltara punya energi besar untuk tumbuh. Yang dibutuhkan sekarang adalah menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan memastikan kerja kita memberi hasil nyata bagi rakyat," tutup Bustan. (NAR)

Kaltara Bersiap Jadi Tuan Rumah Konreg Kasulampua 2026



Tanjung Selor – Setelah sukses pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) tahun 2025 di Banjarmasin, estafet penyelenggaraan kegiatan bergengsi ini resmi beralih ke Provinsi Kalimantan Utara.



Kesepakatan tersebut tertuang dalam "Kesepakatan Wasaka", hasil forum Konreg 2025 yang menjadi komitmen bersama lima wilayah besar di kawasan timur Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan ekonomi regional berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Melalui forum ini, disepakati bahwa Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2026 akan digelar di Provinsi Kalimantan Utara. Langkah ini menandai kepercayaan nasional terhadap Kaltara sebagai provinsi muda yang siap berperan aktif dalam mengonsolidasikan arah kebijakan ekonomi kawasan.

"Kesepakatan Wasaka" sendiri memuat sejumlah komitmen penting, di antaranya peningkatan kolaborasi antarprovinsi dalam penyediaan data statistik dasar dan sektoral, penguatan forum

komunikasi ekonomi dan fiskal, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam melalui riset dan inovasi berbasis digitalisasi. Selain itu, forum juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat regional Kasulampua, agar kebijakan pembangunan semakin berbasis bukti dan terukur

Menindaklanjuti hasil forum di Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Rapat Persiapan Konreg Kasulampua 2026 pada Selasa, 2 September 2025, di Ruang Rapat Gunung Putih, Kantor Bappeda dan Litbang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, Kanwil DJPb, DKISP, Dinas Pariwisata, dan instansi lainnya. Dalam arahannya, Bertius menegaskan pentingnya persiapan sejak dini agar pelaksanaan Konreg 2026 dapat berjalan maksimal. “Kegiatan ini membawa nama baik Provinsi Kalimantan Utara, sehingga seluruh aspek dari substansi sampai penyambutan tamu harus dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.

Rapat juga menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya penetapan Tanjung Selor sebagai lokasi yang diusulkan untuk pelaksanaan Konreg Kasulampua 2026, dengan pertimbangan sebagai ibu kota provinsi sekaligus etalase utama Kalimantan Utara. Struktur kepanitiaan telah dibentuk melalui SK Gubernur, terdiri dari lima unit penunjang dan sejumlah seksi pelaksana, seperti Seksi Acara, Publikasi, Transportasi, *Side Event,* serta Pameran UMKM.

Kegiatan ini akan melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Satpol PP, Dinas Kesehatan, DKISP, Dinas Perindagkop, dan Dinas Pariwisata, guna mendukung kelancaran teknis, keamanan, serta promosi daerah. Selain itu, BPS, Bappeda dan Litbang bersama DKISP akan mengelola website dan kanal media digital untuk publikasi kegiatan, sementara Dinas Pariwisata menyiapkan *side event* berupa pameran UMKM dan promosi potensi wisata unggulan Kaltara.

Dalam diskusi rapat, berbagai peserta sepakat bahwa Tanjung Selor layak menjadi lokasi utama pelaksanaan Konreg Kasulampua 2026. Selain untuk memperkenalkan ibu kota provinsi kepada tamu-tamu dari 18 Provinsi yang berada di wilayah Kasulampua, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat citra Tanjung Selor sebagai kota strategis yang tengah berkembang pesat.

Dinas Pariwisata menambahkan bahwa meski infrastruktur akomodasi perlu disiapkan lebih lanjut, potensi wisata dan kearifan lokal Tanjung Selor akan menjadi nilai tambah dalam penyambutan peserta. Rencananya, beberapa kegiatan pendamping seperti *city tour* dan pameran UMKM juga akan dikemas dalam format yang menarik dan inklusif.

Semangat pelaksanaan Konreg Kasulampua 2026 sejalan dengan misi besar dalam “Kesepakatan Wasaka”, yakni memperkuat peran Kasulampua dalam mendukung perekonomian nasional melalui transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan penguatan tata kelola data, digitalisasi ekonomi, dan hilirisasi industri berbasis potensi daerah, wilayah timur Indonesia diharapkan menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.

Kaltara kini bersiap, bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai motor penggerak kolaborasi data dan ekonomi kawasan timur Indonesia. “Kita ingin Konreg 2026 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi pembangunan Kaltara dan kawasan Kasulampua,” pungkas Bertius. (NAR)





Kaltara Perkuat Aksi Konvergensi Stunting Lewat Transformasi Digital

Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting melalui langkah konkret berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penguatan Sistem Informasi Web Aksi Bangda.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara ini digelar di Hall B Rumah Sakit dr. Jusuf SK, Kota Tarakan, dengan menghadirkan puluhan peserta dari perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., menegaskan bahwa isu stunting masih menjadi tantangan serius yang menuntut penanganan lintas sektor secara konvergen dan berkelanjutan. “Melalui kegiatan Bimtek ini, kita tidak hanya menyamakan persepsi dan pemahaman, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam implementasi kebijakan serta strategi digitalisasi berbasis data melalui Web Aksi Bangda,” ujarnya.

Bimtek yang berlangsung sehari penuh ini melibatkan tim narasumber dari INEY Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, serta fasilitator dari Bappeda Litbang. Materi yang diberikan mencakup pembahasan mendalam mengenai kebijakan nasional dan strategi terbaru Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) 2025–2029, pemahaman Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi, hingga tutorial pengoperasian Web Aksi Bangda.

Web Aksi Bangda sendiri merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program stunting secara real-time dan terintegrasi, sehingga data dari kabupaten/kota dapat dianalisis secara cepat dan akurat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan signifikan terkait penurunan prevalensi stunting di sejumlah wilayah. Namun, dengan terlatihnya para peserta dari lintas perangkat daerah dalam penggunaan Web Aksi Bangda, diharapkan setiap kabupaten/kota mampu menyusun rencana aksi dan tindak lanjut berbasis data yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai.
Dengan semangat kolaboratif dan penerapan sistem digital terpadu, Provinsi Kalimantan Utara meneguhkan langkah menuju generasi bebas stunting dan masyarakat yang lebih sehat di masa depan. (ROM)



GASMITEK : GAS DETEKTOR DAN SPRINKLER AIR BERBASIS INTERNET OF THING

[Inovator : M. Akbar Putra Siregar]

Internet of Things (IoT) adalah interkoneksi perangkat sensor dan aktuator yang memiliki kemampuan berbagi *(sharing)* informasi antar *platform* melalui *framework* yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi *Internet of Things (IoT),* sebagai alat pendeteksi kebocoran gas dapat menjadi inovasi yang solutif yang canggih serta responsif terhadap tantangan keamanan sepanjang jaringan gas alam di Kota Tarakan.

Inovasi GASMITEK : Gas Detektor dan Sprinkler Air berbasis *Internet of Thing* memiliki potensi besar untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam di Kota Tarakan. Alat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebocoran gas serta memadamkan kebakaran ringan secara otomatis.

Teknologi ini dilengkapi dengan sensor yang terhubung secara r*eal time* dan responsif terhadap tanda-tanda awal kebakaran, seperti peningkatan suhu atau adanya gas berbahaya di udara. Dengan menerapkan sistem sprinkler air berbasis IoT, inovasi ini menawarkan sejumlah nilai tambah dalam konteks Kota Tarakan.

Pertama, dari sisi keamanan dan keselamatan, sprinkler ini dapat secara otomatis menyemprotkan air saat mendeteksi kebakaran kecil, mencegah api menyebar dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Kedua, teknologi IoT memungkinkan deteksi dan respons secara real-time, sehingga kebakaran ringan dapat ditangani segera sebelum membesar. Ketiga, inovasi ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena sistem sprinkler hanya akan aktif ketika diperlukan, sehingga membantu menghemat air dan energi.



Terakhir, penerapan teknologi IoT pada sistem perlindungan kebakaran ini juga mendukung visi Kota Tarakan sebagai *Smart City,* yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keamanan masyarakat. Inovasi ini memberikan solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan kebakaran ringan di jaringan gas Kota Tarakan, memastikan keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



KELOR GUARD : SOLUSI ALAMI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

[Inovator : SMK Negeri 1 Nunukan]

Kebakaran di Tarakan merupakan ancaman serius, terutama karena lingkungan urban yang padat dan sulitnya akses layanan pemadam kebakaran di wilayah pesisir. Hal ini menyebabkan kebakaran sering berdampak besar karena respons yang lambat dan kurangnya peralatan pemadam yang memadai. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, tercatat sebanyak 35 kejadian kebakaran terjadi di tahun 2023.



Untuk mengatasi masalah tersebut, inovasi APAR berbahan dasar daun kelor *(Moringa Oleifera)* "Kelor Guard" muncul sebagai solusi yang relevan dan berkelanjutan. Daun kelor, yang melimpah di Tarakan, diketahui memiliki berbagai sifat kimiawi yang mendukung pengendalian api.

Proses pembuatan Kelor Guard relatif sederhana. Bahan yang dibutuhkan termasuk daun kelor segar, baking soda, sabun, air, dan alat sederhana seperti blender serta botol sprayer yang dapat memanfaatkan limbah botol atau plastik yang ada. Dari sisi lingkungan, inovasi ini memberikan dampak yang sangat positif. Penggunaan daun kelor sebagai bahan utama APAR telah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya hingga 95%, sehingga meningkatkan kualitas lingkungan di Tarakan.

Hasil pengujian lingkungan menunjukkan perbaikan yang signifikan, menjadikan kota ini tidak hanya lebih aman dari ancaman kebakaran, tetapi juga lebih bersih dan sehat untuk dihuni. Inovasi APAR berbahan dasar daun kelor ini memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat pesisir Kota Tarakan yang selama ini kesulitan mendapatkan akses terhadap alat pemadam kebakaran konvensional.



Dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, inovasi ini mampu menekan biaya pengadaan alat pemadam kebakaran dan memberikan kemudahan penggunaan bagi masyarakat. Salah satu manfaat langsung yang dirasakan adalah penurunan insiden kebakaran yang meluas karena alat ini dapat segera digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan pelatihan khusus.



ALAT SEMPROT DORONG OTOMATIS TANPA MEMOMPA DAN ANTI GENDONG (SI SEMPRONG)

[Inovator : Lukman Nurul Hakim]

Kelompok Tani Mekar Jaya adalah sebuah kelompok tani ini bergerak pada bidang penanaman sayur. Kelompok Tani Mekar Jaya terletak di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung dan beranggotakan 20 kepala keluarga. Kelompok tani ini sangat bergantung pada alat semprot tanaman gendong.





Dengan area tanaman sayuran seluas 25x100 m membutuhkan waktu 1 hari penuh dan membutuhkan air yang di campur pestisida sebanyak 16x10 Liter. Proses ini membutuhkan fisik yang prima (sehat dan kuat), sehingga apabila mereka sakit mereka pun tidak dapat bekerja dan tidak ada pemasukan.

Selain masalah tersebut, terdapat masalah yang lebih perlu mendapat perhatian yaitu tingkat luas lahan yang dapat dicapai adalah 25x10 m per hari. Alat "Si Semprong" akan menjawab kebutuhan dan masalah yang dihadapi petani, yaitu lebih hemat biaya perawatan, lebih efisien dalam penyemprotan tanaman, dan lebih ringan dalam penggunaan.

Cara penggunaan "Si Semprong" cukup sederhana, dimana penyemprotan dilakukan hanya dengan mendorong alat ini. Gaya sentrifugal poros roda akan di teruskan melalui diameter kecil ke gear diameter besar dengan penghubung rantai, harapannya agar dapat dapat mereduksi putaran dan momen putar dapat bertambah.

Putaran dari gear besar akan di konversi mengunakan poros engkol menjadi gerak naik turun, gerakan naik turun inilah yang akan memompa alat semprot secara otomatis. Petani pun tidak perlu menggendong di karenakan alat ini menggunakan roda sehingga petani hanya perlu mendorong kemudian mengarahkan tongkat semprot ke tanaman.



RUMAH SAKIT MASUK DESA (RUSA MUDA)

[Inovator : H. Mohamad Sarif]

Kabupaten Tana Tidung masih memiliki desa-desa yang sulit dijangkau baik melalui transportasi darat maupun laut. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Disamping itu masyarakat setempat rata-rata memiliki taraf hidup menengah kebawah, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

Sulitnya akses menjangkau pusat ibu kota dan mahalnya biaya yang dikeluarkan membuat masyarakat dari desa-desa terjauh sulit mendapat akses Pelayanan Spesialistik. Program Rumah Sakit Masuk Desa "RUSA MUDA" merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Kesehatan yang mana penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses Pelayanan Kesehatan Spesialistik.

Jenis pelayanan RUSA MUDA meliputi Pelayanan kesehatan spesialistik berupa layanan pemeriksaan dokter spesialis (Penyakit dalam, Kandungan dan Anak), dokter umum, dokter gigi, penguatan edukasi dan gerakan bersama peduli pencegahan dan penanganan stunting,

Selain itu, menyediakan alat kesehatan USG dan EKG Portable, pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya, pelayanan KB gratis dengan metode pil, kondom, suntik, implan dan IUD, dan pelayanan Sircumsisi/khitan serta perluasan asuransi kesehatan.









DETEKSI FATIGUE DRIVER (DFD TOOLS)

[Inovator : Muhammad Syamsul Arifin]

Kalimantan Utara, sebagai provinsi baru di Indonesia,memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor transportasi darat yang menjadi tulang punggung konektivitas daerah. Namun, tantangan dalam menjaga keselamatan pengemudi sangatlah krusial, terutama terkait kelelahan *(fatigue)* yang kerap menjadi penyebab kecelakaan.

Inovasi teknologi dalam bidang keselamatan berkendara menjadi urgensi yang tak terelakkan, terutama seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, DFD Tools diusulkan sebagai sebuah alat inovatif berbasis sains dan teknologi yang dapat mendeteksi tanda-tanda kelelahan pengemudi secara *real time* dan memberikan peringatan preventif.

DFD Tools merupakan sebuah terobosan baru yang memanfaatkan teknologi webcam untuk mendeteksi wajah pengemudi dan menganalisis tanda-tanda kelelahan, seperti mata yang sering tertutup, gerakan kepala yang tidak fokus, serta perilaku mengantuk lainnya. Selain itu, alat ini juga mampu mendeteksi aktivitas merokok dan memantau fokus pengemudi.

Dengan adanya speaker yang memberikan peringatan suara, DFD Tools akan membantu mencegah kecelakaan akibat kelelahan. Inovasi ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas di Kalimantan Utara yang merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah. Dengan mengurangi kecelakaan akibat kelelahan, produktivitas transportasi dan distribusi barang serta jasa akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.







Event	Without DFD	With DFD
Detection Fatigue and sleep	N/A	Detected
Detection when calling	N/A	Detected
Detection when Smoking	N/A	Detected
Detects when the view is not focused	N/A	Detected
Information With whatsapp	N/A	Available
Suara Peringatan di Dalam Mobil	N/A	Available



UPAYA PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN MELALUI APLIKASI SIBATIK

[Inovator : Dedy Salman]

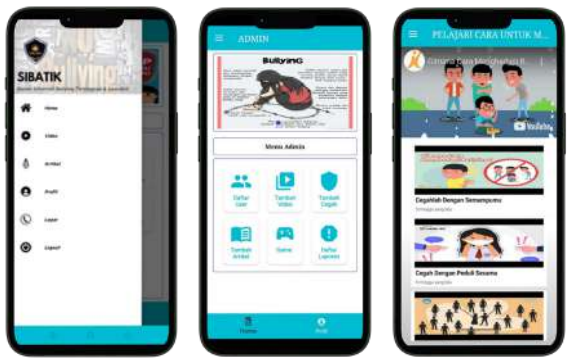
SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi Dan Interaktif) merupakan pengembangan aplikasi smartphone berbasis android yang terintegrasi dan interaktif. Kebaharuan aplikasi SIBATIK terletak pada proses penyusunannya menggunakan *block programming kodular. Kodular* merupakan situs web yang menyediakan *tools* yang menyerupai *MIT App Inventor* untuk membuat aplikasi android dengan menggunakan blok programming.

SIBATIK memiliki 6 pilihan menu yang terintegrasi dengan tiga instansi seperti Dinas Pendidikan, DSP3A Nunukan dan Unit PPA Polres Nunukan. Sedangkan interaktif aplikasi ini sangat *user friendly* (mudah digunakan) yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan informasi tentang bullying.

Pada menu definisi dan menu video merupakan sumber referensi informasi seputar buli yang terjadi. Pada menu tersebut terdapat sejumlah informasi pengertian buli, jenis-jenis buli, sampai bagaimana kita dapat mempelajari tentang kasus *bullying* yang terjadi melalui tayangan video.

Pada menu cegah dan menu artikel merupakan edukasi yang dapat kita pelajari. seperti menu video cegah kita diajarkan bagaimana cara untuk mencegah jika kita menjadi korban perundungan atau bullying. Sedangkan menu artikel merupakan hasil riset atau jurnal ilmiah yang relevan tentang kasus perundungan atau bullying yang terjadi di Indonesia.

Pada menu Lapor, seorang pengguna aplikasi SIBATIK diminta untuk melengkapi sejumlah laporan yang mereka ketahui. Menu ini tidak hanya diperuntukkan bagi korban, melainkan saksi dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai langkah preventif jika perundungan atau *bullying* terjadi. Aplikasi sudah digunakan lebih dari 100 pengguna yang berada di Nunukan.



POTRET RUANG



Kawasan mangrove bekantan adalah tempat perlindungan bagi hewan bekantan yang langka dan endemik Kalimantan, yang berlokasi di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan. Kawasan ini merupakan objek wisata edukasi yang menampilkan hutan mangrove dengan berbagai jenis pohonnya dan memungkinkan pengunjung melihat bekantan serta satwa lainnya secara langsung di habitat aslinya.

Bekantan (Nasalis larvatus) adalah primata endemik Kalimantan yang hidup di ekosistem tepi sungai, terutama di bagian muara sungai, hingga mencapai 60 sampai 300 kilometer jauhnya ke arah pedalaman.

Monyet ini juga kerap dikenal dengan sebutan monyet belanda, karena memiliki hidung besar memanjang yang khas.



Foto dan teks : Ady Setiawan





Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, mendampingi Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dalam penandatanganan Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Provinsi Kaltim yang dihadiri langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. (7/8)



Kabid. Litbang, Mochamad Sarkawi, menjadi narasumber dalam pendampingan penginputan inovasi daerah di Kab. Nunukan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu perangkat daerah untuk meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah dari tahun sebelumnya melalui pelaporan inovasi yang lebih baik. (31/7)



Kepala Bappeda dan Litbang menerima kunjungan dari Kanwil DJPb Provinsi Kaltara dalam rangka Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2025. Diketahui bahwa Realisasi APBN di Kaltara sampai dengan 31 Agustus 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp1.573,23 miliar atau terkontraksi 36,97% yoy. (29/9)



Plt. Kabid. Perekonomian dan SDA, Dian Suryanata memimpin pembahasan penyempurnaan RAD-Pangan Gizi Prov. Kaltara Tahun 2025-2029 yang merupakan perencanaan turunan dari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang menjadi landasan perencanaan pembangunan sektor pangan dan gizi di daerah (28/7)

Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Di Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara tengah menghadapi dilema klasik pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi terus bergerak cepat. Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, degradasi mangrove, hingga pencemaran air menjadi masalah nyata yang perlu segera ditangani. Sayangnya, perhatian terhadap isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan masih terbatas.

Data menunjukkan bahwa alokasi belanja fungsi lingkungan hidup dalam APBD Kaltara rata-rata hanya sekitar 0,4% dari total belanja daerah pada 2018–2020. Angka yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kompleksitas tantangan yang ada.

Untuk menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghadirkan terobosan melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Skema ini mengaitkan penyaluran Bantuan Keuangan ke kabupaten/kota dengan capaian indikator ekologi. Artinya, semakin baik kinerja daerah dalam menjaga lingkungan, semakin besar insentif fiskal yang diterima. Dengan demikian, TAPE tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga mekanisme penghargaan yang menempatkan ekologi sebagai prioritas pembangunan daerah.

Implementasi TAPE dimulai pada tahun 2020. Seiring perjalanannya hingga saat ini, TAPE berkembang menjadi strategi pembangunan hijau yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan mekanisme penilaian yang adil, transparan, dan berbasis data. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sejumlah kriteria dan indikator sebagai dasar perhitungan alokasi TAPE.

Kriteria dan indikator ini berfungsi sebagai panduan untuk menilai kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mendorong perbaikan kualitas ekologi di daerah.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman publik, artikel ini menyajikan sosialisasi singkat mengenai TAPE Kalimantan Utara. Uraian meliputi dasar hukum yang menjadi pijakan, tahapan pelaksanaan yang telah ditempuh,



serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam skema ini.

Harapannya, informasi ini dapat memperluas pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga dukungan terhadap implementasi TAPE semakin menguat. Dengan demikian, Kaltara dapat memperkokoh peran sebagai pelopor fiskal hijau di Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan menuju target Net Zero Emission 2060.

Apa itu TAPE?

TAPE adalah mekanisme transfer fiskal dari provinsi ke kabupaten/kota dengan menggunakan indikator lingkungan hidup sebagai dasar pemberian insentif.

Kebijakan ini hadir dengan tujuan utama mendorong pemerintah daerah untuk aktif menjaga kelestarian sumber daya alam, memperkuat komitmen terhadap pembangunan hijau dan berbasis rendah karbon, serta memberikan insentif fiskal yang adil dan proporsional bagi daerah-daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam pengelolaan lingkungan. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan

Landasan hukum dan prinsip kebijakan ini dibangun di atas sejumlah regulasi strategis, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, serta Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Tak ketinggalan, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Pengurangan Gas Rumah Kaca periode 2010–2030, serta Pergub Nomor 23 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola keuangan bantuan daerah—mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga sistem monitoring dan evaluasi. Regulasi-regulasi ini menjadi tulang punggung komitmen pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), setiap kriteria memiliki bobot tertentu (%) yang menggambarkan tingkat kepentingan isu lingkungan tersebut dalam penilaian keseluruhan. Bobot kriteria kemudian didistribusikan ke masing-masing indikator sesuai dengan prioritas dan tingkat urgensinya. Dengan begitu, skor akhir yang diperoleh daerah tidak hanya bergantung pada ada/tidaknya program, tetapi juga kualitas, konsistensi, serta proporsi kebijakan/anggaran yang dialokasikan didaerahnya.

Dasar Pembobotan dan Penilaian Kriteria dan Indikator tertuang pada SK.188.44/K389/2024 tentang Petunjuk Teknis TAPE KALTARA. Berkas Form *Self Assesment* dan legalitas TAPE dapat diakses pada https://bit.ly/TAPEKU .

Implementasi TAPE mengikuti enam tahapan terstruktur untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan dampak ekologis yang positif.

Tahap pertama dimulai dengan *self assessment* yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, diikuti dengan pengusulan program dan kegiatan prioritas TAPE untuk tahun anggaran berikutnya. Usulan ini wajib mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta keselarasan dengan kebijakan ekologis provinsi.

Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Penilai TAPE, yang memastikan kesesuaian dokumen, kelayakan teknis, dan relevansinya dengan prinsip ekologi. Selanjutnya, tim yang sama melakukan penilaian komprehensif melalui

mekanisme skoring dan indeksing, berdasarkan indikator kinerja lingkungan, kesiapan daerah, serta potensi dampak ekologis jangka panjang.

Berdasarkan hasil penilaian, pemerintah provinsi menetapkan alokasi pagu TAPE dan menyetujui daftar usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Setelah itu, dana TAPE disalurkan dan dicairkan sesuai ketentuan, diikuti oleh pelaksanaan program oleh pemerintah daerah penerima.

Untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip ekologi, seluruh proses dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat. Evaluasi ini tidak hanya mengukur capaian fisik dan keuangan, tetapi juga dampak terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan pendekatan ini, TAPE hadir bukan sekadar sebagai transfer fiskal, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen nasional maupun global terhadap transisi ekologis

Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Bukan sekadar skema pendanaan, TAPE adalah komitmen nyata untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan iklim. Sejak diterapkan, program ini telah membawa dampak konkret di berbagai sektor dari hutan hingga perkotaan, dari pemerintah hingga pelajar.

Salah satu terobosan utama TAPE adalah penguatan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui pelatihan bagi

KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT (%)
Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di APL	20
Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	25
Jumlah jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran lahan di APL yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota	17
Jumlah titik api/hotspot terjadi di APL di wilayah pemerintah kab/kota	8
Adanya Peraturan dan kebijakan mengenai Pencegahan dan Pengendalian Karhutla yg diterbitkan Kab/Kota	25
Proporsi Anggaran Kab/Kota untuk kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla terhadap total APBD	25
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13
Rasio Ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan dan pertumbuhannya	40
Adanya kebijakan yang mendorong tersedianya RTH di kabupaten/kota	60
Pengelolaan Sampah	20
Adanya kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota	25
Jumlah inovasi dan/atau penghargaan yang diterima pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat dalam pengelolaan persampahan	8
Persentase penanganan sampah yang di kelola (Persentase penanganan dan pengurangan sampah)	25
Persetase sampah yang didaur ulang	17
Proporsi Anggaran Pengelolaan Sampah	25
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Lingkungan Hidup	20
Kinerja Capaian IKLH	25
Usulan lokasi proklim	8
Lokasi proklim yang telah teregister di SRN	25
Sekolah Adiwiyata	17
Jumlah kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat inovatif	25
Energi Baru Terbarukan	7
Jumlah kegiatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di kabupaten/kota	40
Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di kabupaten/kota	60
Pengarus Utamaan Gender	7
Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di kabupaten/kota	11
Adanya kebijakan Daerah terkait dengan Pengarus Utamaan Gender diterbitkan oleh Kabupaten/Kota	33

relawan desa, peningkatan kapasitas petugas, serta penyediaan sarana seperti menara pemantauan dan alat pemadam, daerah kini lebih tanggap dan siap menghadapi ancaman bencana lingkungan tahunan ini.

Di perkotaan dan pedesaan, TAPE mendorong transformasi pengelolaan sampah. Infrastruktur seperti Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), bank sampah, dan kendaraan angkut modern kini semakin merata. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi polusi, tapi juga membuka peluang ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular di mana sampah menjadi sumber daya, bukan beban.

Yang membedakan TAPE adalah keterlibatan aktif masyarakat. Pelajar dilibatkan dalam gerakan penghijauan dan edukasi iklim, warga mengelola sampah secara mandiri, dan komunitas mulai memanfaatkan energi surya untuk kebutuhan sehari-hari. Partisipasi ini diperkuat oleh dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan solusi inovatif yang sesuai dengan konteks lokal.

Melalui penjelasan singkat ini, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran jelas mengenai implementasi TAPE di Kaltara, mulai dari dasar hukum, tahapan pelaksanaan, hingga kriteria dan indikator yang digunakan. Dengan semakin luasnya pemahaman, TAPE diharapkan bukan hanya menjadi instrumen fiskal semata, tetapi juga sarana edukasi dan kolaborasi bersama dalam menjaga lingkungan serta mewujudkan pembangunan hijau yang berkelanjutan di Kaltara. (NF)



Optimalisasi RTH Di Kabupaten dan kota



Penguatan Pencegahan Karhutla melalui Pelatihan dan dukungan SARPRAS



Meningkatkan Pengelolaan Persampahan



Mendorong Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Pola Pemanfaatan Lokal pada Ekosistem Gambut

GIZ

Setidaknya terdapat 56 desa dari 12 kecamatan berada di area Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) di Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan ada keterikatan antara masyarakat dengan ekosistem gambut termasuk sumber daya alam yang ada. Ekosistem gambut berdasarkan PP 71/2014 didefinisikan sebagai tanah gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, kestabilan dan produktifitasnya.

Berdasarkan lokasinya, gambut di Kalimantan Utara termasuk kategori transisi karena letaknya bersisian dengan mangrove atau area pasang surut.
Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat umumnya dalam bentuk penggunaan lahan gambut sebagai area pertanian, budidaya burung walet serta mencari ikan. Namun, sebagian besar lahan gambut tersebut berada dalam area konsesi perkebunan sawit dan HTI/HPH.

Di samping itu, pembangunan jalan sebagai bagian dari pemberian akses kepada masyarakat juga memanfaatkan lahan gambut. Merujuk pada kajian terkait kearifan lokal yang dilakukan oleh GIZ pada tahun 2021 di Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sesayap Hilir, tidak ada penyebutan khusus dalam bahasa lokal mengenai lahan gambut dan masyarakat umumnya menyebut dengan rawa.

Selain itu tidak ditemukan dokumen tertulis pemanfaatan ekosistem gambut di Kalimantan Utara. Pengetahuan lokal diperoleh dari memori kolektif seperti kedalaman gambut serta area yang dapat dimanfaatkan kaitannya dengan tingkat kesuburan dan produktivitas lahan. Informasi lain yang diperoleh yaitu tentang kesadaran dalam menjaga hutan gambut untuk kelangsungan budi daya sarang walet. Masyarakat berpendapat bahwa hutan gambut merupakan habitat serangga kecil yang menjadi pakan burung walet.

Seiring dengan perubahan zaman dan modernisasi, sistem pertanian masyarakat telah berubah. Pada masa lampau, pemanfaatan hutan gambut bersifat ekstraktif namun terbatas serta perladangan konvensional. Saat ini sistem pertanian yang ada telah menggunakan teknologi



SARANG WALET



KEBUN BUAH NAGA DI LAHAN GAMBUT DESA SENGKONG

mekanik namun jumlah petani padi semakin berkurang.

Salah satu contoh kasus pada Desa Atap, Kecamatan Sembakung, area yang dijadikan sawah berada di gambut dangkal sehingga perlu ada pengelolaan hidrologi dengan parit cacing, pintu air dan pematang. Akan tetapi, hal tersebut tidak mendapat respon dari pihak terkait sehingga hasil pertanian khususnya padi memiliki produktivitas yang rendah.

Banjir merupakan fenomena alami yang terjadi pada ekosistem gambut. Pada masa lampau, masyarakat – khususnya di wilayah Sembakung – dapat memprediksi kejadian banjir dengan jangka waktu 3–5 tahun sekali. Perubahan frekuensi dan durasi banjir terjadi ketika perusahaan/konsesi untuk HTI, sawit, bahkan tambang mulai beroperasi. Banjir yang tidak dapat diprediksi berdampak pada penyempitan ruang hidup misalnya gagal panen. Ruang hidup dimaknai sebagai aktivitas ekonomi berbasis lahan khususnya pertanian.

Pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu dari ekosistem gambut dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar, obat tradisional (herbal) hingga bahan ritual adat. Pemanfaatan sumber daya ikan masih kurang dikembangkan salah satunya karena kejadian banjir yang tidak bisa diprediksi. Pola pemanfaatan ekosistem gambut berubah dari konsep ekstraksi menjadi menanam dan merawat.



SUMBER DAYA IKAN DI EKOSISTEM GAMBUT



PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN

Adaptasi yang dilakukan masih mengandalkan sumber daya lahan terutama alih fungsi menjadi tambak, kolam ikan, kebun sawit, kebun buah serta budidaya walet. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan fungsi ekologi perlu menjadi perhatian utama. ekologi perlu menjadi perhatian utama. (GIZ)



Delegasi Sri Lanka Pelajari Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Utara

GGGI

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Sri Lanka dalam rangka pertukaran pembelajaran mengenai rehabilitasi ekosistem mangrove. Kegiatan ini difasilitasi melalui program NASCLIM, yang dikoordinasikan di antara Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, *Global Green Growth Institute (GGGI)* dan *Wetlands International* Indonesia.

Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Paliwang, serta perwakilan Kabupaten Bulungan, menekankan komitmen daerah dalam melindungi mangrove yang menjadi penopang penghidupan masyarakat pesisir sekaligus pendorong transisi ekonomi hijau dan biru.

“Semoga kunjungan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para peserta, sehingga mereka dapat pulang dengan membawa ilmu yang bisa diaplikasikan dalam konteks perlindungan mangrove mereka,” ujar Gubernur Zainal.

Delegasi Sri Lanka, dipimpin oleh Dr. R. D. S. Jayathunga, Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup Sri Lanka, menyampaikan apresiasi atas kesempatan mempelajari kebijakan dan aksi nyata yang dilakukan Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. “Kami sangat senang berkunjung ke Kalimantan Utara dan mempelajari secara langsung kebijakan serta rencana aksi dalam melindungi mangrove,” ucap Jayathuga.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, menyoroti posisi Indonesia dalam rehabilitasi mangrove di tingkat global. “Indonesia bersama



KUNJUNGAN LAPANGAN DELEGASI SRI LANKA KE DESA LIAGU, KABUPATEN BULUNGAN

Sri Lanka dan negara mitra lain berkomitmen mempromosikan perlindungan mangrove, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, melalui inisiatif *'World Mangrove Center'* yang kita rencananya kembangkan." ujar Ristianto.

Hari kedua, delegasi mengunjungi Desa Liagu di Kabupaten Bulungan untuk meninjau lokasi rehabilitasi mangrove seluas 15 hektare yang merupakan praktik sukses Wetlands International pada tahun 2022–2023 menggunakan metode *Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR).*

Melalui intervensi EMR berupa pembuatan saluran pasang surut baru dan peninggian permukaan tambak, aliran pasang surut kembali mengalir dengan normal, menyebarkan bibit-bibit alami dan memungkinkan terbentuknya tegakan mangrove baru secara alami. Intervensi ini akan direplikasikan melalui program NASCLIM di empat desa lain di Kalimantan Utara, dan dua desa di Kalimantan Timur.

"Setelah faktor biofisik dipulihkan, alam akan mengambil alih dan hasilnya adalah hutan mangrove alami yang lebih beragam, tumbuh lebih cepat, dan lebih tangguh," ujar Aji Nuralam Dwisutono, Staf Teknis Senior Bidang Rehabilitasi dari Wetlands International Indonesia.

Dr. Jayathunga menegaskan manfaat yang dilihat langsung di lapangan. "Menarik sekali melihat bagaimana rehabilitasi mangrove di Kalimantan Utara tidak hanya mengatasi risiko iklim, tetapi juga mendukung ekonomi lokal melalui produk berbasis mangrove dan keterlibatan masyarakat," tambahnya.

Kunjungan ini juga memberi ruang dialog dengan masyarakat Desa Liagu mengenai penghidupan berkelanjutan berbasis mangrove. Selain mempelajari teknik rehabilitasi, pertukaran ini memperkuat kerja sama jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan iklim dan mendukung implementasi Rencana Adaptasi Nasional maupun Provinsi di Sri Lanka. Benjamin Tular, GGGI *Sustainable Landscapes Lead,* turut menyampaikan bahwa pertukaran ini bukan hanya tentang mempelajari teknik rehabilitasi melainkan juga membangun kemitraan jangka panjang untuk ketahanan iklim. (GGGI)





KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

[Penulis : Nuraini Asri[1]]

Perlindungan khusus anak merupakan mandat internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam konteks nasional, perlindungan tersebut dipertegas melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan aturan sektoral lainnya.

Namun, tantangan implementasi di tingkat daerah dan komunitas masih signifikan, masih banyak anak yang mendapatkan kekerasan terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang mestinya menjadi pelindung bagi mereka.



Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain, siapapun yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah menikah, dianggap sebagai anak dalam konteks undang-undang ini.

Anak-anak adalah usia yang rentan mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, konflik hukum, disabilitas, bencana, atau trafficking sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi mereka.

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa.

Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri (Dania, 2020).

Berdasarkan Data Simfoni KPPPA RI Tahun 2022 ada 115 kasus kekerasan seksual terhadap anak,

Tahun 2023 ada penurunan menjadi 79 namun Tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 141 kasus, kemudian sampai bulan juni tahun 2025 tercatat ada 40 kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga total kasus kekerasan seksual se-Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2022 sampai dengan juni 2025 adalah 375 kasus.

Kota Tarakan menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan seksual anak dengan 222 kasus, disusul oleh Kabupaten Nunukan dengan 61 kasus, Kabupaten Bulungan dengan 45 kasus, serta Kabupaten Malinau dengan 28 kasus dan Kabupaten Tana Tidung dengan 19 kasus.

Tabel 1.
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KALIMANTAN UTARA
2022 HINGGA 30 JUNI 2025

NO	KAB/KOTA	2022	2023	2024	2025
1	BULUNGAN	5	24	12	4
2	TARAKAN	81	38	79	24
3	MALINAU	10	4	10	4
4	NUNUKAN	18	7	30	6
5	TANA TIDUNG	1	6	10	2
	KALTARA	115	79	141	40

Sumber : Data Simfoni KPPPA RI

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Utara bahwa pada Tahun 2024 ada 263.304 jumlah penduduk usia anak di Provinsi Kalimantan Utara sehingga jika dihitung menggunakan rasio kekerasan seksual terhadap anak pada Tahun 2024 maka didapatkan angka 5,36, artinya bahwa dari 10.000 anak ada 6 anak yang pernah mendapatkan kekerasan seksual yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat entah itu orang tua kandung, orang tua tiri, kakek, paman, kakak, tetangga, dan lain-lain.

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum. Menurut *World Report on Violence and Health, WHO, 1999: child abuse and neglect (CAN)* adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak kekerasan seksual secara fisik dan kesehatan mungkin tidak memiliki dampak yang terlalu besar yang dirasakan dan dipermasalahkan oleh anak, tetapi secara psikis anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki banyak dampak yang akan dirasakan oleh si anak, seperti bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain (Ramadhani & Nurwati, 2023).

Dampak psikologis yang terjadi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak yang menjadi korban. Karena umumnya pelaku kekerasan seksual dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga anak akan cenderung mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak nantinya akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika waktu anak mengalami kekerasan seksual tersebut anak tidak menyadari bahwa dia anak korban dari kekerasan seksual. Trauma yang di alami oleh anak korban kekerasan seksual akan sulit dihilangkan apabila tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya (Noviana, 2015).



Faktor-faktor risiko terhadap kejadian kekerasan seksual anak ditinjau dari 3 aspek yaitu :

1. Faktor masyarakat/sosial
   Meliputi kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang rendah, kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, kebiasaan pola tatanan dimasyarakat tentang pengasuhan anak, pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada anak dan pengaruh media massa.

2. Faktor orang tua atau situasi keluarga
   Meliputi riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua remaja, imaturitas emosi, ketidakmampuan didalam merawat anak, kurang nya kepercayaan diri, dukungan sosial yang tidak memadai, keterasingan yang dikategorikan sebagai bagian dari isolasi sosial dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian, masalah interaksi dengan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, riwayat bunuh diri pada orang tua dan keluarga, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, serta kurangnya pengertian mengenai perkembangan anak.

3. Faktor anak
   Meliputi anak yang cacat secara fisik dan mental, anak yang kurang mendapat kasih sayang dan tidak diinginkan oleh keluarganya, anak yang sebelumya pernah mengalami kekerasan seksual, anak dengan orang tua tunggal, anak yang menggunakan obat-obatan terlarang dan anak yang percaya dirinya kurang.



Dari referensi beberapa jurnal penelitian yang telah dipublikasikan maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki profil diantaranya:

- Berasal dari keluarga disfungsi, termasuk *broken home*
- Kerap menonton video porno
- Tidak mampu mengontrol hawa nafsu (lemah kontrol impuls)
- Memiliki gangguan kesehatan mental
- Memiliki masalah pada hubungan interpersonal

- Minim pendidikan moral dan internalisasi agama

Rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan yakni **Pada tingkat keluarga dan sekolah,** pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus dimulai sejak dini melalui pendidikan seksualitas yang sesuai usia, disampaikan dengan cara yang bijak dan proporsional. Orang tua dan guru perlu menanamkan nilai-nilai moral, termasuk rasa malu yang sehat, tanpa menimbulkan rasa takut berlebihan.

Komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh kepercayaan antar anggota keluarga menjadi fondasi penting agar anak merasa aman berbicara ketika mengalami situasi tidak nyaman. Di samping itu, penting pula menumbuhkan kemandirian dan keberanian pada anak sesuai tahap perkembangannya, sekaligus meningkatkan pengawasan aktif dari orang tua dan pendidik.

Anak juga perlu diberi pemahaman mengenai hak-haknya serta dampak nyata dari kekerasan seksual. Perlindungan hak anak harus dijamin di semua lini kehidupan, termasuk dengan mengatur dan membatasi penggunaan gawai agar terhindar dari paparan konten berisiko.

Di tingkat pemerintah, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kerangka hukum dan layanan perlindungan. Sosialisasi secara masif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme penanganan kasus.

Demikian pula dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 yang mengamanatkan pembentukan layanan terpadu bagi korban perempuan dan anak, serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia dan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami konsekuensi hukum yang tegas.

> ***Secara psikis anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki banyak dampak yang akan dirasakan oleh si anak, seperti bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain.***

Sinergi antar lembaga baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, tokoh agama, maupun tokoh adat harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang holistik. Selain itu, pemerintah perlu menginisiasi regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan gawai bagi anak, sekaligus memperketat pengawasan konten digital melalui Dinas Komunikasi dan Informatika agar konten tidak layak anak tidak mudah diakses.

Upaya pencegahan juga harus didukung oleh penguatan layanan keluarga, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah beroperasi di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malinau baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran operasional.

Pembangunan lebih banyak Pusat Kreativitas Anak (PKA) akan memberikan ruang positif bagi anak mengisi waktu luang dengan kegiatan edukatif dan produktif. Terakhir, fasilitas layanan kesehatan mental perlu diperluas dan diakses secara merata, karena pemulihan psikologis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses rehabilitasi korban kekerasan seksual.

Perlindungan khusus anak bukan hanya kewajiban moral, tapi mandat hukum nasional dan internasional. Untuk itu, dibutuhkan upaya sistematis, kolaboratif, dan berbasis bukti demi mewujudkan Indonesia yang benar-benar ramah anak.

[1] Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Provinsi Kaltara



Masjid Sultan Kasimuddin

Warisan Sejarah dan Arsitektur Islam di Tanjung Palas

Diantara rimbunnya pepohonan dan hamparan sungai yang tenang di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, berdiri sebuah bangunan yang menyimpan jejak peradaban Islam di Kalimantan Utara, Masjid Sultan Kasimuddin. Lebih dari sekadar tempat ibadah, masjid ini adalah simbol kebanggaan sekaligus warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat setempat.

Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin (1901–1925), salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Bulungan. Bangunan seluas 585,64 meter persegi ini berdiri di atas lahan seluas 3.560,25 meter persegi dan dibangun dengan material semi permanen kombinasi kayu ulin dan beton yang mencerminkan kearifan lokal dalam memadukan kekuatan alam dan kebutuhan spiritual.

Usai wafat, Sultan Kasimuddin dimakamkan di halaman barat masjid, dikelilingi makam keluarga kerajaan lainnya menjadi pengingat abadi akan keterkaitan erat antara kekuasaan, agama, dan masyarakat pada masa itu.

Salah satu keunikan Masjid Sultan Kasimuddin terletak pada desain arsitekturnya. Bangunan ini menampilkan tiga tingkatan atap dua atap berbentuk limasan dan satu kubah di puncak semuanya terbuat dari kayu ulin yang tahan











cuaca dan memberikan kesejukan alami di dalam ruangan.

Yang menarik, masjid ini tidak memiliki jendela, namun dilengkapi 11 pintu yang tersebar di seluruh sisi bangunan. Tiga di depan, tiga di kiri, tiga di kanan, dan dua di samping mihrab berbentuk segi lima. Sirkulasi udara melalui pintu-pintu inilah yang membuat suasana di dalam masjid tetap sejuk meski tanpa pendingin ruangan.

Lantai masjid dihiasi tegel bermotif Eropa, hadiah dari Kerajaan Belanda kepada Kesultanan Bulungan bukti nyata hubungan diplomatik dan budaya lintas bangsa di masa lalu.

Hingga kini, Masjid Sultan Kasimuddin tetap aktif sebagai pusat kehidupan keagamaan masyarakat Tanjung Palas. Setiap Jumat, jamaah memadati masjid untuk menunaikan salat berjemaah dan mendengarkan khutbah. Di bulan Ramadhan, masjid menjadi pusat kegiatan tarawih, tadarus, dan buka puasa bersama. Tak jarang pula, masjid ini menjadi lokasi akad nikah maupun pertemuan sosial penting warga.

Bagi para pelancong yang ingin menyelami akar sejarah Islam di Kalimantan Utara, Masjid Sultan Kasimuddin menawarkan pengalaman wisata religi yang autentik. Suasana tenang, arsitektur klasik, serta makna historis yang menyertainya menjadikan masjid ini tempat yang layak dikunjungi.

Akses ke lokasi cukup mudah bisa ditempuh dengan sepeda motor, mobil, perahu tambangan, atau *speed boat.* Bagi yang ingin menginap, tersedia penginapan dan hotel di wilayah Tanjung Selor maupun Tanjung Palas.

Masjid Sultan Kasimuddin bukan hanya bangunan tua yang megah, tapi juga jantung kehidupan spiritual dan budaya yang terus berdenyut di Tanjung Palas. Di tengah laju zaman, masjid ini tetap berdiri tegak, menjaga sejarah, mengalirkan nilai, dan menyambut siapa pun yang datang dengan keramahan khas Bumi Bulungan.

(FOTO & TEKS) ADY SETIAWAN



MENGENAL TOKOH *URBAN LEGEND* DARI KALTARA (BAGIAN 2)

[Penulis : Ida Ayu Parlina[1]]

Uy, Peradi!

Setelah berkenalan dengan si Hantu Air bernama Jerenun di buletin sebelumnya, kita beralih ke tokoh legenda urban dari Kaltara selanjutnya. Masih dari Bulungan tersebutlah sosok hantu bernama Bilau. Sekilas peran Bilau mirip dengan Wewe Gombel sebagai hantu penculik. Namun ibarat kata pepatah lain ladang lain belalang, lain benua lain pula hantunya.

Dari namanya saja dapat ditebak apa gender Wewe Gombel atau Nenek Gombel. Konon Wewe Gombel adalah roh gentanyangan seorang perempuan yang dikhianati dan ditinggalkan oleh suami yang ia cintai sepenuh hati. Jika Wewe Gombel jelas adalah seorang wanita, Bilau tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya akibat kesaktian Bilau yang mampu mengubah wujud menjadi siapa pun yang diinginkannya.

Perbedaan lainnya, jika Wewe Gombel memiliki spesialisasi menculik anak-anak—karena konon semasa hidupnya Wewe Gombel tidak bisa memiliki anak yang menjadi alasan suaminya meninggalkannya, tidak demikian dengan Bilau. Korban Bilau berasal dari berbagai usia. Bilau tidak pandang bulu, Bilau tidak pilih kasih. Tidak hanya lihai menyembunyikan anak-anak, Bilau juga mahir menyesatkan orang dewasa. Pokoknya Bilau lebih kejam. Sekali kamu masuk perangkapnya kamu bakal jadi tak berdaya.

Perbedaan mencolok lainnya antara Bilau dengan makhluk dari dunia kegelapan lainnya adalah jam operasional. Seperti telah disepakati secara universal, waktu kemunculan makhluk-makhluk astral dimulai saat mentari memasuki peraduan dan tirai malam mulai diturunkan. Para hantu hanya leluasa beraksi dalam gelap, sebut saja vampire. Penghisap darah itu kehilangan kekuatannya bila terkena sinar matahari. Lalu ada pula Manusia Serigala yang hanya bisa berubah wujud saat bulan purnama.

Jarang ditemukan hantu yang buka praktek setelah mentari terbit. Pada umumnya malam hari adalah waktu operasional para hantu, mulai senja hingga menjelang fajar menyingsing. Namun, penerapan masa aktif tidak berlaku bagi Bilau. Jam kerja Bilau bebas, tidak ada aturan mengikat apalagi pembatasan bersyarat. Justru Bilau paling suka melakukan aksinya di siang bolong, saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun.

Jaman dulu, pada masa penduduk belum seramai saat ini, perempuan dan anak-anak lebih suka berkumpul di rumah saja pada siang hari. Meski tidak ada larangan tertulis, tapi setelah makan siang anak-anak dianjurkan bahkan dipaksa untuk tidur siang. Konon jika ada anak yang bandel berkeliaran sendirian di luar rumah, maka ia akan tenapuk Bilau (disembunyikan atau diculik Bilau). Sungguh suatu kepercayaan yang membuat ibu-ibu gelisah dan anak-anak menjadi resah. Ingin menyangkal dengan mengatakan itu hanya mitos, tapi korban

sudah berjatuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita *flash back* ke masa lalu.

Di sebuah kampung di tepi sungai Kayan, terdapat sebuah rumah yang letaknya agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Rumah mungil yang bertiang dan berlantai dari Ulin itu berdinding papan Bengkirai dan beratap Sirap, membuat rumah itu sejuk kala panas dan romantis kala hujan. Di belakang rumah terdapat hutan dengan pepohonan tinggi yang masih rapat. Begitu rapatnya jarak tumbuh antar pohon membuat cahaya matahari terhalang oleh rimbunnya dedaunan.



Biasanya rumah itu hanya dihuni oleh seorang perempuan setengah baya bersama dua orang anak gadisnya yang sudah remaja. Sementara sang suami lebih sering berada di luar rumah, jika tidak sedang di laut maka ia bermalam di ladang. Rutinitas ketiga perempuan ini sederhana, bangun tidur, mandi, memasak, beberes atau berkebun di pekarangan, makan siang, istirahat, mandi, makan malam lalu tidur. Mereka menganyam tikar pandan untuk mengisi waktu luang.

Suatu hari, rutinitas itu berubah dengan kedatangan seorang perempuan yang ditugaskan untuk menyampaikan undangan. Perempuan penyampai undangan itu mengenakan kebaya dan betapis (berkain) pelekat, sebuah selendang diikat menyilang dari bahu kiri ke pinggang kanan. Penyampai undangan (pernikahan, khitanan atau syukuran kelahiran) itu disebut Tukeng Bepetau sedangkan tradisi menyampaikan undangan secara lisan dari rumah ke rumah disebut Bepetau.

Kembali ke tiga perempuan tadi, setelah Tukeng Bepetau berpamitan mereka merundingkan perihal undangan yang baru mereka terima. Karena ketidakhadiran suaminya, si perempuan bertindak selaku kepala rumah tangga sementara memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut, meskipun mendapat penolakan dari anak pertamanya yang berharap bisa tinggal di rumah saja. Si anak pertama ini seorang yang pendiam, pemalu dan merasa gelisah berada di keramaian. Jiwa introvert-nya meronta-ronta, tapi desakan adiknya yang sangat gembira akan bertemu orang banyak dan kekhawatiran ibunya jika ia tinggal sendiri di rumah membuatnya mengangguk setuju meski dengan berat hati.

Hari yang ditunggu pun tiba, matahari baru saja terbit ketika si ibu dan anak kedua mulai memuat ke dalam perahu sayuran dan buah-buahan. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat memberikan hasil kebun atau ladang sebagai bentuk perhatian atau kepedulian. Beberapa ikat pucuk daun ubi dan batang serai, jantung pisang, pisang dan papaya telah memenuhi dulung biduk atau haluan perahu, tak lupa dimuat pula tas berisi pakaian ganti dan tiga lembar tikar pandan yang rencananya akan ditukar dengan sembako.

Sementara itu, si anak pertama masih berada di dapur membereskan peralatan masak setelah sarapan. Sungguh separuh hatinya masih enggan meninggalkan rumah. Setelah memastikan bara di tungku sudah padam ia lalu menuju guleng (ruang terbuka untuk mencuci dan menjemur) yang terletak di bagian belakang rumah. Saat hendak mengunci pintu belakang ia mendengar suara ibunya memanggil dari pekarangan, “Nduy, kito ika nyambil!” Nduy, ke sini kamu sebentar! ‘Nduy’ bukanlah nama sebenarnya, melainkan panggilan sayang.

Nama si anak pertama adalah Farida. Mendengar suara ibunya, Farida urung mengunci pintu. Ia keluar menuruni tangga menghampiri ibunya yang sedang membungkuk di dekat rumpun bambu.

Farida bertanya kepada ibunya yang masih mengais dedaunan seolah mencari-cari sesuatu,

"Nun kenulaumu, mak?", "Apa yang kamu cari, ibu?" Ibu yang masih membungkuk menjawab, "Ngekulau kunyit," "Mencari kunyit," mendengar jawaban itu Farida ikut membungkuk dan mulai menyingkirkan tumpukan batang-batang lengkuas yang baru dipotong, mengira di bawahnya akan ditemukan kunyit yang ibu cari. Tapi ternyata tidak ada apa-apa selain rumput basah. Farida menengadah dan menatap mata ibu. Ibu menunjuk ke satu arah, "Dinon perasek," "Di situ mungkin," kata ibu.

Farida berjalan menuju arah yang ditunjukkan ibu. Ibu mengikutinya dari belakang. Setiap kali Farida berbalik si ibu akan berkata, "Dinon perasek," hal itu terjadi berulang ulang. Pagi itu cuaca cerah, burung-burung berkicau riang gembira, bunyi serangga hutan dan suara monyet nyaring bersahut-sahutan. Farida dan 'ibunya' terus berjalan menjauhi pekarangan menembus lebatnya pepohonan.

Akhirnya keinginan Farida terkabul, dia tidak pergi ke pesta pernikahan. Begitu pula adik dan ibunya yang panik ketika menyadari Farida mendadak hilang. Farida tenapuk Bilau. Farida disembunyikan Bilau. Hari itu warga kampung dimotori oleh para pemuda melakukan pencarian secara intensif, bahkan ritual Nitik Seraping pun dilakukan di hari kedua. Nitik Seraping adalah pencarian sambil memukul tampah dan peralatan dapur lainnya. Menurut kepercayaan warga, Bilau akan melepaskan mangsanya jika pencarian dilakukan dengan suara-suara yang berisik.

Di hari ketiga, Farida ditemukan di atas pohon, masih hidup namun kondisinya memprihatinkan. Wajahnya pucat, tubuhnya yang lemah dipenuhi bekas gigitan serangga. Farida yang tak pandai memanjat ditemukan duduk bersandar di sebuah cabang pohon yang melengkung seolah sedang memeluknya.

'Ibu' yang membawa Farida masuk ke hutan tentu saja bukanlah ibunya. Dia adalah Bilau yang sedang beraksi dan Farida telah terpedaya oleh penyamarannya yang sempurna. Konon, selama masa penculikan Bilau memberi makan korban dengan serangga dan cacing, serta memberi minuman dari air hujan atau embun yang tertampung di daun. Di tempat lain, di sebuah perkampungan yang ramai, seorang anak laki-laki sedang gelisah. Saat jam istirahat di sekolah tadi ia dan tiga orang kawannya berjanji akan bermain kelereng. Namun, saat seharusnya dia asyik bersama teman-temannya ibu malah mengurungnya di kamar. Hal itu sungguh mengesalkan baginya. Jiwa anak-anak yang ingin bermain sepuasnya berontak.

Nama panggilan anak itu adalah Seman, usianya 9 tahun lebih. Seman akhir-akhir ini sering sakit, itulah sebabnya dokter menyarankan Seman untuk istirahat yang cukup agar tubuhnya segera pulih. Saran dokter itu diambil serius oleh ibu Seman dengan memangkas waktu bermain Seman dan mewajibkan Seman untuk tidur siang. Sebagaimana anak-anak lainnya, bagi Seman larangan bermain dan kewajiban tidur siang adalah hukuman.

Dengan kesal Seman berbaring berpura-pura tidur, sebenarnya dia sedang menunggu ibunya terlelap. Setelah memastikan ibunya sudah tidur, Seman mengendap-endap keluar kamar lalu bergegas menyelinap keluar rumah. Tidak butuh waktu lama Seman sudah berada di tepi sungai Kayan. Di bawah teduhnya pepohonan tiga orang kawannya sedang bekuri guli (bermain kelereng).

Namun ternyata permainan kelereng hari itu kurang asyik. Kemenangan hanya dikuasai oleh satu orang anak. Anak-anak lainnya yang kalah melulu segera merasa bosan. Kedatangan Seman disambut dengan ide mengganti permainan. Seorang anak mengusulkan permainan Tapuk Pal (Petak Umpet) yang disetujui oleh ketiga anak lainnya. Siang itu, saat posisi matahari tepat di atas kepala keempat anak itu mulai bermain penuh semangat.

Mereka tertawa gembira saat berlarian saling mendahului menuju tiang pal. Dua babak pertama berlalu dengan sukses, babak ketiga giliran Seman yang jaga. Seman mulai menghitung, setelah hitungan kesepuluh dia membuka mata dan mulai mencari tempat persembunyian teman-temannya. Tidak jauh dari tiang pal, dari balik perahu yang

terbalik seorang anak memperhatikan Seman. Tidak seperti anak-anak lain yang gugup tempat persembunyiannya diketahui, anak satu ini justru tersenyum ketika Seman berjalan mendekatinya.

"Ssst … Man, kito ika," "Ssst … Man, ke sini kamu," bisiknya sambil meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Setelah Seman mendekat dia menunjuk satu arah, "Dinon, dinon …" "Di situ, di situ …" bisiknya. Seman menatap mata anak itu yang kemudian meraih tangan Seman, menuntunnya menuju arah yang ditunjukkannya.

Teman-teman Seman yang masih bersembunyi terus menunggu Seman mencari mereka. Karena Seman tak kunjung mencari, lama-lama mereka menjadi kesal. Satu persatu mereka keluar dari persembunyian. Seman tidak ada. Mereka mengira Seman sedang mengerjai mereka dengan diam-diam kembali ke rumah. Namun dugaan mereka meleset. Ibu Seman yang kesal telah diakali oleh anaknya mendatangi mereka dan menanyakan keberadaan Seman. Ternyata Seman tidak ada di rumahnya, tidak ada di tepi sungai, juga tidak ada di rumah tetangga dan rumah kerabatnya. Seman tenapuk Bilau kata orang-orang. Seman disembunyikan Bilau.

Siang yang penuh kedamaian pun berubah menjadi sore yang penuh ketegangan. Anak-anak ketakutan, orang-orang dewasa panik. Tepian sungai disusuri, setiap sudut yang biasa menjadi tempat persembunyian anak-anak diperiksa. Namun batang hidung Seman tidak ditemukan. Ketegangan semakin menyelimuti perasaan ketika matahari semakin condong ke barat. Beruntung, menjelang Mahgrib keberadaan Seman diketahui. Orang Pintar yang ditemui oleh ibu Seman memberikan petunjuk agar pencarian difokuskan di sekitar lokasi terakhir Seman bermain. Seman ditemukan di kolong rumah, tepatnya di dalam cekungan anak tangga terakhir.



Tiang rumah itu memang rendah dan tangganya yang pendek hanya terdiri dari tiga undakan. Seman yang kurus meringkuk di situ tengah tertidur pulas. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat dan suhu tubuhnya hangat karena demam. Malam itu Seman diinterogasi oleh ibu, namun Seman tidak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Seman hanya ingat dia dan teman-temannya sedang bermain Tapuk Pal. Kejadian lain setelah itu tak terekam dalam memorinya.

Orang bijak bilang, *"There's a silver lining in every cloud."* Ya, jika direnungkan selalu ada hikmah dibalik musibah. Peristiwa yang menimpa Seman seolah sebuah peringatan bagi para orang tua agar lebih waspada dalam mengawasi anak-anaknya. Juga pukulan yang keras bagi anak-anak agar mematuhi orang tua. Orang tua mendisiplinkan anak karena rasa sayang.

Adapun Bilau, tidak diketahui motif dibalik aksinya. Diyakini Wewe Gombel menculik anak-anak karena ingin merasakan pengalaman menjadi seorang ibu yang tak pernah dirasakannya, lalu Bilau apa maunya? Mungkin penculikan yang dilakukan Bilau dipicu oleh rasa kesepian. Mungkin tindak kriminal yang dilakukan Bilau merupakan pelampiasan rasa frustrasi atas kegagalannya mendapatkan teman karena penampilan aslinya yang buruk ditambah kepribadiannya yang labil. Bisa jadi juga Bilau didorong oleh sensasi menyenangkan dari energi ketakutan yang dilepaskan oleh keluarga korban. Atau D. Semua jawaban benar.

Bagaimana menurut pembaca? Seorang kawan berteori bahwa Bilau hanyalah *scapegoat*. Dalam kasus hilangnya orang-orang itu justru Bilau adalah korban sesungguhnya. Bilau dikambinghitamkan oleh orang-orang yang menyerah pada *intrusive thoughts* mereka. Ketika mereka dituntut untuk memberikan penjelasan yang logis atas tindakan mereka itu, mereka gagal. Namun, ini hanya teori. Semua kemungkinan di atas bisa saja terjadi. Wallahualam.

[1] Pegiat Literasi

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

80

DIRGAHAYU

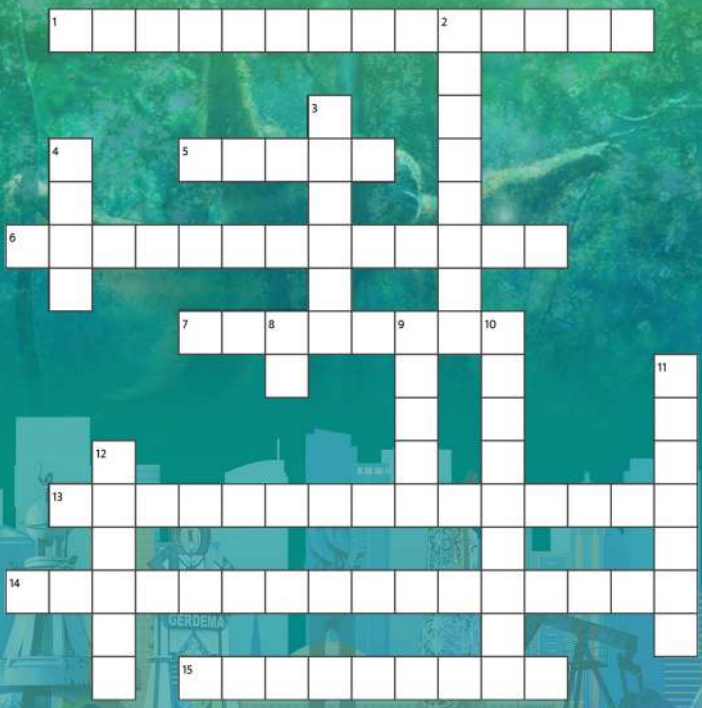
INDONESIA

— 17 AGUSTUS 1945 —

SEMOGA INDONESIA TERUS BERSINAR DAN MENJADI TEMPAT DI MANA SEMUA WARGANYA HIDUP DALAM DAMAI, HARMONI, DAN KEMAKMURAN. MERDEKA!

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK

TEKA-TEKI
Silang



Pertanyaan.

Mendatar :

1. Taman nasional yang terletak di Kalimantan Utara, terkenal dengan keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat adat di sekitarnya.
5. Sungai besar yang melintasi Tanjung Selor.
6. Program TPKJM berfokus pada peningkatan layanan kesehatan jenis ini.
7. Primata endemik Kalimantan dengan nama latin Nasalis larvatus.
13. Lokasi pembangunan Sport Center SMA Garuda di Tanjung Selor.
14. Kegiatan Nasional yang akan digelar di Kaltara pada tahun 2026.
15. Forum nasional di Jakarta pada tahun 2025 tempat Kaltara menerima penghargaan sebagai pelopor EFT.

Menurun :

2. Visi dan misi besar Presiden dan Wakil Presiden RI yang terdiri dari delapan cita-cita nasional.
3. Nama kesepakatan hasil Konreg PDRB Tahun 2025 di Banjarmasin.
4. Nama tim yang dibentuk Kaltara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
8. Tanda kendaraan Kalimantan Utara.
9. Tim di Kaltara yang memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas lintas sektor.
10. Nama ibukota baru Indonesia.
11. Kabupaten di Kaltara yang paling luas wilayahnya.
12. Nama lama bagi wilayah Kalimantan, sering disebut dalam konteks Sejarah.

TTS Buletin Lensa Pembangunan, yuk ikuti !

- Tersedia hadiah menarik untuk 3 pemenang beruntung yang berhasil menyelesaikan TTS dengan benar
- Satu orang hanya bisa mengisi satu kali dalam satu edisi buletin
- TTS tidak berlaku untuk ASN Bappeda dan Litbang Kaltara beserta keluarga
- Telah mengikuti akun Instagram @Bappedalitbangkaltara
- Jawaban dikirim melalui DM Instagram Bappeda dan Litbang
- Pemenang akan diumumkan pada Instagram Bappeda dan Litbang
- Batas akhir pengiriman jawaban tanggal 20 November 2025

#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

Dirgahayu 13 Tahun

KALIMANTAN UTARA

KOLABORASI MENUJU KALTARA MAJU, MAKMUR, DAN BERKELANJUTAN

25 Oktober 2012 - 25 Oktober 2025



bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id